

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DALAM

PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



VERINA GAYATRI

167310547

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Usulan Penelitian ini dengan judul “Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru”, dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah usulan penelitian. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;

6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak M.Antono dan Ibu Milawati yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teruntuk sahabat dunia dan akhirat Dinda Agustin, Lia Roni, Fitri Ramadhayanti, Ika Krisma Putri dan Rezdhika Yolanda terimakasih tanpa henti yang bisa penulis ucapkan sampai saat ini;
9. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya proposal ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 18 November 2020

Verina Gayatri

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	22
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	22
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	24
A. Studi Kepustakaan.....	24
B. Penelitian Terdahulu	28
C. Kerangka Pikir	35
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41

A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Analisis Data.....	44
F. Jadwal Penelitian.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	48
B. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru.....	49
C. Gambaran Umum Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).....	54
D. Visi Misi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).....	56
E. Uraian Tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).....	58
F. Struktur Organisasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru	61
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Identitas Informan	62
B. Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru.....	63
C. Hambatan- Hambatan dalam Peran Komisi Penanggulangan AIDS	97
D. Hasil Analisis	97
BAB VI PENUTUP100	
A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Kasus HIV dan AIDS Di Provinsi Riau Tahun 1997 Sampai Dengan September 2018 Di Rinci per Kabupaten/Kota.....	12
Tabel I.2	Jumlah Kasus HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru Yang Menyebabkan Kematian Dari Tahun 2000 Sampai Dengan Bulan Oktober 2017	13
Tabel I.3	Jumlah Kasus HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2000 Sampai Dengan Bulan September 2018	14
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	35
Tabel II.1	Operasional Variabel	39
Tabel III.1	Informan Dalam Penelitian Peran Komisi Penanggulangan AIDS Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS DI Kota Pekanbaru	41
Tabel III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian	45
Tabel IV.1	Nama-nama Pejabat Walikota Yang Pernah Memerintah Di Kota Pekanbaru.....	50
Tabel IV.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Pekanbaru Tahun 2019	52
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Di Kota Pekanbaru Tahun 2019	53
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019	53
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Umur	62
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.2 Kerangka Pikir Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Menanggulangi HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru35



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Verina Gayatri
NPM : 167310547
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 05 Januari 2021

Pernyataan



Verina Gayatri

PERAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) DALAM PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Verina Gayatri

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Dalam Peran Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang minim akan informasi mengenai Pencegahan, Penanggulangan dan Penularan HIV/AIDS. 2. Dalam Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya Peran Dinas Komisi Penanggulangan AIDA (KPA) dalam pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS diantara nya : (a). Minimnya anggaran yang diterima Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang diberikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. (b). Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak memadai untuk menjalankan fungsi KPA yang seharusnya (c). Kurangnya Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam memberikan informasi mengenai Pencegahan, Penanggulangan, Penularan serta dampak dan akibat dari HIV/AIDS kepada masyarakat umum.

Kata Kunci : Peran, Penanggulangan, HIV/AIDS

THE ROLE OF THE AIDS COMMISSION (KPA) IN THE TREATMENT OF HIV / AIDS IN THE CITY OF PEKANBARU

ABSTRACT

Verina Gayatri

Based on the results of the author, the authors in this chapter draw some conclusions and in addition they will receive suggestions to add input for those who are interested and needed. The conclusions of this study are: 1. In the role of the HIV / AIDS Commission (KPA), Pekanbaru City is not running optimally, because there are still many people who do not have information about HIV / AIDS Prevention, Control and Transmission. 2. In the role of the AIDS Commission (KPA), it is inextricably linked to the obstacles that influence the course of the role of the AIDS Commission (KPA) in the implementation of the prevention and prevention of HIV / AIDS, among others: a. The minimum budget that the AIDS Commission (KPA) receives from the government to carry out HIV / AIDS prevention and control activities. b. Inadequate human resources (SDM) to perform the correct functions of the KPA c. The lack of role of the AIDS Prevention Commission (KPA) in providing information about prevention, control, transmission and the impact and consequences of HIV / AIDS to the general public.

Keywords : Role, Prevention, Of HIV/AIDS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara diantaranya untuk mensejahterakan rakyat dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan di Negara Republik Indonesia diberbagai daerah. Pemerintahan sebagai aparatur Negara yang mengatur urusan kenegaraan bertanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kegiatan Negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat 1 menyebutkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan dibagi ke daerah-daerah kabupaten/kota yang tiap provinsi, kabupaten dan daerah mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan

- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatat sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kependudukan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan, dan
- r. Kearsipan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang terdapat pada pasal 12 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa salah satu urusan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan wajib yaitu urusan Kesehatan. Salah satu bentuk hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal kewenangan adalah adanya kebijakan nasional seperti pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immuno Defiency Syndrome*) yang dipusat dan juga didaerah.

Tugas dan fungsi pemerintahan yaitu, pemerintahan merupakan suatu gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat yaitu hubungan antara manusia dengan setiap kelompok termasuk dalam keluarga. Pemerintahan memegang pertanggung jawaban atas kepentingan rakyat dan juga pemerintah adalah semua beban yang memproduksi mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan sipil. Sementara itu tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, dimana tugas

pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan (power) yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Kesehatan merupakan hak azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskrimintif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka manusia akan sulit melaksanakan semua kegiatan dan aktivitasnya yang harus dikerjakannya setiap harinya. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan, dan salah satu faktor yang paling mempengaruhi adalah perilaku. Perilaku yang sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan.

Sebagaimana yang tercantum pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan ber tujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk mencegah dan menanggulangi semakin parahnya penyebaran HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) Di Kota Pekanbaru bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah saja akan tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Maka dari itu untuk menanggulunginya terjadi laju HIV dan AIDS pemerintah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru.

Dalam kehidupan manusia dapat ditemukan berbagai macam permasalahan yang bersifat global seperti masalah ekonomi, keamanan, lingkungan hidup, dan juga kesehatan. Masalah kesehatan yang saat ini belum terpecah salah satunya adalah HIV dan AIDS, dimana penyebarannya yang sangat cepat terjadi diseluruh dunia. HIV singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* adalah penyebab virus AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah sindroma menurunkan kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), merupakan salah satu penyakit yang sangat menakutkan dan mematikan diseluruh dunia. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah dua istilah berbeda tetapi saling berhubungan. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang menyebabkan terjadinya AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*). Sedangkan tahap AIDS

(*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) adalah situasi dimana seorang telah benar-benar menurun daya tahan tubuhnya dan telah terinfeksi penyakit-penyakit penyerta atau sering disebut infeksi opportunistic.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) virus yang menyebabkan penyakit ini, merusak sistem pertahanan tubuh (sistem imun), sehingga orang-orang yang menderita penyakit ini kemampuan untuk mempertahankan dirinya dari serangan penyakit menjadi berkurang. Seseorang yang positif mengidap HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), belum tentu mengidap AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*). Banyak kasus dimana seseorang mengidap HIV(*Human Immunodeficiency Virus*), tetapi tidak menjadi sakit dalam jangka waktu yang lama. Namun, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang ada pada tubuh seseorang akan terus merusak sistem imun, akibatnya, virus, jamur, dan bakteri yang biasanya tidak berbahaya menjadi sangat berbahaya karena rusaknya sistem imun tubuh.

Virus tersebut masih belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan epidemic sehingga HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) menjadi fokus perhatian dunia sampai saat ini. Saat ini banyak juga masyarakat yang belum mengetahui dampak dan faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) dan juga cara mencegahnya, karna saat ini di lingkungan masyarakat sudah kurang terjadinya sosialisasi mengenai HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) maka dari itu sangat di perlukannya

sosialisasi yang cukup mengenai HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) dilingkungan masyarakat agar masyarakat paham mengenai penularan HIV dan AIDS.

Cara penularan virus HIV / AIDS :

1. Melalui hubungan seksual

Merupakan jalur utama penularan HIV / AIDS yang paling umum ditemukan. Virus dapat ditularkan dari seseorang yang sudah terkena HIV kepada mitra seksual (pria ke wanita, wanita ke pria, pria ke pria) melalui hubungan seksual tanpa pengaman (kondom). Jalur ini dapat dicegah dengan cara :

- a. Abstinence : tidak berhubungan seksual;
- b. Be faithful : saling setia dengan satu pasangan;
- c. Condom : selalu menggunakan kondom saat melakukan hubungan seksual;
- d. Drug : tidak menggunakan obat-obatan terlarang

2. Perental (produk darah)

Penularan penularan bisa terjadi melalui transfusi darah atau produk darah, atau penggunaan alat-alat yang sudah dikotori darah seperti jarum suntik, jarum tato, tindik. Jalur ini bisa dicegah dengan cara :

- a. Memastikan bahwa darah yang diterima pada saat transfusi tidak mengandung HIV / AIDS
- b. Memastikan bahwa peralatan (jarum suntik, jarum tato, tindik) telah diseterilkan dan apabila memungkinkan gunakan peralatan yang sekali pakai buang.

3. Perintal

Penularan melalui ibu kepada anaknya, ini bisa terjadi saat anak masih berada dalam kandungan, ketika dalam proses lahir atau sesudah lahir. Kemungkinan ibu pengidap HIV / AIDS melahirkan bagi HIV / AIDS positif adalah 15-39%. Seorang bayi yang baru lahir akan membawa antibody ibunya, begitupun kemungkinan positif dan negatifnya si bayi tertular HIV adalah tergantung dari seberapa parah tahapan perkembangan AIDS pada diri sang ibu. Sebaiknya lakukan tes darah sebelum hamil, kelompok yang beresiko terkena HIV adalah :

- a. Wanita dan laki-laki yang selalu berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual;
- b. Wanita dan laki-laki pekerja keras;
- c. Melakukan hubungan seksual yang tidak wajar seperti melalui mulut, homoseksual dan biseksual;
- d. Penyalahgunaan obat-obatan melalui suntikan secara bergantian (Desta Ayu, 2020 : 170)

Pemahaman masyarakat yang kurang tentang HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) perlu diminalisir agar penanganan mengenai HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) ini dapat dicegah, salah satu caranya adalah bukan dengan cara memerangi penderitanya dan menjauhi penderitanya tetapi dengan menghentikan penyebaran virusnya, yaitu melalui penggunaan jarum suntik, pemakaian narkoba dan seks berisiko tinggi. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) merupakan salah satu penanggulangan dan pencegahan HIV (*Human*

Immunodeficiency Virus) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*), dimana salah satu tujuan dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru adalah meningkatkan upaya pencegahan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) pada semua masyarakat termasuk pada kelompok berisiko tinggi dan masyarakat umum. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) melakukan pencegahan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) tersebut juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan orang terinfeksi HIV dan untuk pengendalian perkembangan virus HIV, sangat dibutuhkan program dukungan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk menahan perkembangan infeksi menjadi AIDS. Bagi mereka yang stadium AIDS, kegiatan utama yang perlu dilakukan adalah penyediaan pengobatan dengan ARV melalui sistem pengadaan dan distribusi ARV yang optimal serta lingkungan yang mendukung yaitu peka terhadap gender dan bebas dari stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi HIV yang membutuhkan pengobatan. Cara penanggulangan HIV / AIDS adalah :

1. Perlu ditingkatkan sosialisasi melalui berbagai sektor mulai dari instansi pemerintah, pendidikan, masyarakat desa organisasi, kelompok pemuda dan semua sasaran yang masih dapat dijangkau. Pemerintah lebih mengutamakan pada pendidikan masyarakat mengenai apa itu HIV, cara penularan penyakit HIV, serta pencegahan HIV. Hal itu bertujuan agar para masyarakat bisa mengubah kebiasaan hidup tidak sehat yang memudahkan penularan HIV /

AIDS. Selain itu, Pemerintah dan KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) juga harus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari HIV / AIDS, yang diantara sebagai berikut:

- a. Mulai membiasakan diri dengan perilaku seks yang sehat, karena penularan HIV bisa terjadi akibat sekks bebas, homoseks, dan seks tanpa pengaman;
 - b. Tidak sembarangan menggunakan jarum suntik dan alat-alat kesehatan yang steril;
 - c. Mulai membiasakan untuk menjauhi penggunaan Narkoba karena rentan tertular penyakit HIV;
 - d. Menerima transfusi darah dari penderita HIV / AIDS, untuk itu lakukan upaya pemeriksaan untuk memastikan pendonor bebas dari HIV;
 - e. Menganjurkan bagi wanita yang positif HIV untuk tidak hamil agar tidak menularkan kapada janin dalam kandungan.
2. Perlu di bentuk Komunitas Masyarakat peduli HIV / AIDS. Masyarakat merupakan sekelompok orang yang memiliki kesemaan dan keinginan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga keterlibatan masyarakat menjadi sangatlah penting dalam mempertimbangkan kebutuhan yang diperlukan untuk bertindak demi kepentingan bersama. Kaitannya dengan HIV adalah faktor risiko yang menjadi faktor kunci dalam mempengaruhi masyarakat.

Beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah dalam hal penanganan dan

Pencegahan yang dapat dilakukan Pemerintah dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) :

1. Sosialisasi yang intensif penyuluhan tentang penyakit HIV / AIDS. Data menunjukkan bahwa faktor utama penyebaran penyakit ini adalah ketidaktahuan mengenai faktor-faktor penyebab dan penyebaran penyakit ini, hal ini terutama dialami oleh generasi muda. Pemerintah daerah dalam satuan unit yang terkecil dapat melakukan penyuluhan, misalnya bidan desa, lurah, dokter, mantra melakukan penyuluhan agar ibu hamil rutin melakukan kunjungan untuk memperoleh informasi tentang HIV dan konseling.
2. Pemerintah daerah dapat melakukan pencegahan terhadap hal kecil yang bisa disanyilir yang menyebabkan penyakit HIV / AIDS ini kemudian akan dating dan menular. Misalnya penggunaan narkoba biasanya didahului dengan penyakit masyarakat seperti judi dan miras, khususnya di kalangan pelajar dan pemuda ataupun pemudi. Pemerintah dapat mencegahnya dengan bersikap tegas untuk memberantas penyakit masyarakat yang dapat mengundang terjadinya penyakit HIV / AIDS. Misalnya dengan cara menindak lanjuti pemuda ataupun pemudi yang mabuk-mabukan, kumpul kebo, pelajar yang akan melakukan seks bebas, dan termasuk penyebaran video VCD porno.
3. Pemerintah dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dapat melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV / AIDS terutama terkait dengan transfusi darah dan pemakain jarum suntik

secara bergantian dengan melakukan pengawasan di RSUD, PMI, dan Puskesmas.

4. Pemerintah daerah dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mempunyai kewajiban dan tanggung jawab serta kekuasaan untuk melakukan koordinasi dimasyarakat dan perangkat-perangkatnya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS misalnya, dengan melakukan koordinasi dengan sekolah-sekolah, pemuka agama, orang tua, RSU, dan tokoh masyarakat lainnya dengan membangun suatu organisasi kecil untuk melakukan gerakan yang dapat rutin dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV / AIDS.

Penanggulangan HIV / AIDS dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan para pengidap penyakit HIV / AIDS . Masyarakat termasuk LSM merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan penanggulangan sedangkan pemerintah berkewajiban memperdayakan masyarakat serta memberikan bantuan arahan, bimbingan serta menciptakan suasana yang menunjang.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) adalah lembaga yang dikoordinir oleh KPA Kota yang diketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai Ketua Pelaksana yang melibatkan lembaga donor, Organisasi Perangkat Daerah, di Lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait, LSM, dan organisasi profesi, serta intensif, menyekuruh, terpadu dan terkoordinisasi. Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, KPA kota menyusun strategi Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru

berpedoman pada strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS yang ditetapkan oleh KPA Nasional dan situasi epidemi HIV/AIDS di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru selaku koordinator dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Pekanbaru harus menjalin kerjasama dengan instansi-instansi yang bersangkutan salah satunya adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) , adapun bentuk kerjasama yang terjalin KPA Kota Pekanbaru dengan LSM dalam upaya Penanggulangan HIV dan AIDS seperti mengadakan pelatihan, kegiatan hari AIDS sedunia, sosialisasi seperti mengadakan workshop, serta sosialisasi ke sekolah ataupun universitas dan juga bentuk kerjasama seperti kegiatan penjangkauan langsung ke lapangan dimana terdapat kelompok beresiko tinggi. KPA Kota Pekanbaru rutin mengadakan pertemuan dan rapat, baik pertemuan resmi ataupun pertemuan tidak resmi yang waktunya tidak menentu. Pertemuan resmi yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPA di hadiri oleh Bapak Wakil Walikota selaku Ketua Pelaksana Kpa Kota Pekanbaru, LSM-LSM Peduli AIDS beserta anggota-anggota terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan lain-lain. Dalam pertemuan resmi seperti itu biasanya LSM melaporkan bagaimana situasi terkait penyebaran HIV/AIDS, kendala-kendala yang dihadapi dilapangan dan pembahasan mengenai pencapaian dalam menekan tingkat penyebaran HIV/AIDS untuk kedepannya.

Sumber Dana yang diterima KPA Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diperoleh dari Pemerintah dan juga swasta. Dana yang diterima dari

Pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan juga bantuan utama lain dari swasta berupa dana dari luar negeri yaitu *Global Fund* melalui Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Akan tetapi sumber dana yang direrima dari lembaga donor yaitu *Global Fund* ini sudah dihentikan dan hanya mendapat bantuan dana dari APBD. Pemutusan dukungan dana *Global Fund* mengakibatkan pelaksanaan koordinasi dan penanggulangan HIV/AIDS menjadi terhambat. Minimnya sumber dana yang diterima KPA Kota Pekanbaru telah menjadi faktor utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal. Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi seperti mengadakan pertemuan atau rapat dan kegiatan penanggulangan seperti *roadshow* juga telah diminimalisir akibat minimnya sumber dana yang diterima KPA.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota saat ini belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah tercantum di Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dikarenakan saat ini Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota terhambat akan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sangat minim yang mengakibatkan kinerja KPA tidak berjalan dengan efektif dan 2 tahun belakangan KPA memang tidak berjalan dalam melaksanakan penanggulangan HIV/AIDS dikarenakan beberapa faktor yang dimana salah satu faktornya ialah anggaran yang diberikan Pemerintah masih minim dan membuat terhambatnya KPA dalam menjalankan program Penanggulangan HIV/AIDS, lalu kantor KPA yang tidak memadai sehingga membuat melemahnya kinerja KPA saat ini. Dengan begitu sangat diperlukannya peran KPA yang lebih efektif lagi untuk melaksanakan

penanggulangan HIV/AIDS, bekerjasama dengan beberapa instansi-instansi terkait HIV/AIDS agar jumlah angka HIV/AIDS tidak terus bertambah.

Perkembangan kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Provinsi Riau meningkat secara tajam dan cukup signifikan dan wilayah penularan serta penyebarannya semakin meluas, HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) sudah menjadi ancaman epidemik. Dari tahun 1997 sampai dengan bulan September 2018 di Provinsi Riau telah terdapat 5.410 kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*). Untuk lebih jelas mengenai kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) yang terdapat di Provinsi Riau penulis sajikan tabel berikut :

Tabel I.1: Jumlah kasus HIV dan AIDS di Provinsi Riau dari tahun 1997 sampai dengan bulan September 2018 dirinci per Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus HIV dan AIDS
1.	Pekanbaru	2.670
2.	Dumai	506
3.	Rokan Hilir	308
4.	Indragiri Hilir	279
5.	Bengkalis	535
6.	Kampar	204
7.	Siak	214
8.	Pelalawan	334
9.	Rokan Hulu	121
10.	Indragiri Hulu	85
11.	Meranti	93

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kasus HIV dan AIDS
12.	Kuansing	61
Jumlah		5.410

Sumber : Modifikasi Olahan Penulis, 2020

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa dari 12 Kabpuaten/Kota yang ada di Provinsi Riau maka Kota Pekanbaru merupakan Kabupaten/Kota yang paling banyak di temukan kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) yaitu 2.670 kasus. Seiring dengan perkembangan zaman Kota Pekanbaru juga memiliki permasalahan mengenai penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*), melihat kondisi yang demikian, maka pencegahan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) salah satunya dengan meningkatkan komunikasi melalui sosialisasi tentang bahayanya penularan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*), serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) Di Kota Pekanbaru.

Perkembangan jumlah kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kota Pekanbaru akhir-akhir ini meningkat drastis dan sudah menjadi ancaman epidemik, terbukti dengan adanya kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kota Pekanbaru yang menyebabkan kematian. Dimana pengidap penyakit AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) lebih tinggi dengan tercatat data 364 kasus yang menyebabkan kematian, sedangkan pengidap penyakit HIV

(*Human Immunodeficiency Virus*) tercatat 25 kasus yang menyebabkan kematian.

Agar lebih jelas penulis uraikan tabel berikut :

Tabel I.2: Jumlah Kasus HIV Dan AIDS di Kota Pekanbaru Yang Menyebabkan Kematian Dari Tahun 2000 Sampai dengan Bulan Desember 2019

No	Kasus HIV dan AIDS yang Menyebabkan kematian	Jumlah Kasus
1	HIV	25
2	AIDS	364
Jumlah		389

Sumber : Modifikasi Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat dan simpulkan bahwa kasus kematian terbesar yaitu orang yang mengidap penyakit AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kota Pekanbaru pada bulan Desember 2019 sebanyak 364. Dengan melihat kasus kematian yang sangat memprihatinkan maka kasus HIV dan AIDS yang ada Di Kota Pekanbaru dapat menjadi permasalahan yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab atas HIV dan AIDS.

Masalah HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) ini sudah sangat menyebar di seluruh penjuru dunia yang sangat mengkhawatirkan karena sebagian orang yang terkena penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) ditemukan pada kelompok umur produktif yaitu usia 25-29 tahun dan 30-34 tahun. Untuk melihat lebih jelas mengenai permasalahan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kota Pekanbaru maka penulis sajikan tabel berikut :

Tabel I.3: Jumlah Kasus HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru Dari Tahun 2000 Sampai Dengan Bulan Oktober 2019

NO	Tahun	Jumlah Kasus HIV	Jumlah Kasus AIDS	Jumlah Total
1.	2000	-	1	1
2.	2002	-	5	5
3.	2004	3	10	13
4.	2005	4	42	46
5.	2006	7	49	56
6.	2007	14	71	85
7.	2008	16	61	77
8.	2009	79	54	133
9.	2010	76	64	140
10.	2011	124	63	187
11.	2012	77	48	125
12.	2013	121	71	192
13.	2014	136	111	247
14.	2015	241	168	409
15.	2016	261	187	448
16.	2017	190	76	266
17.	2018	219	226	445
18.	2019	440	148	588
Jumlah		2.008	1.829	3.463

Sumber : Modifikasi Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas dapat kita lihat dari tahun 2000 sampai dengan bulan Oktober 2019 kasus HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan yang cukup tinggi terutama empat tahun terakhir. Untuk mencegah maupun menanggulangi semakin parahnya penyebaran penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) tersebut pemerintah maupun masyarakat harus sama-sama berperan dalam mengatasinya.

Salah satu hal untuk mengantisipasinya penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) maka salah satu langkah pemerintah adalah dengan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) pemerintah Kota Pekanbaru khususnya membuat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) melalui Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Komisi Penanggulangan AIDS di

Pekanbaru yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di daerah.

Sebagaimana yang terdapat pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan Pemberdayaan masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di daerah disebutkan bahwa dalam rangka Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kabupaten/Kota dan selanjutnya pada ayat (4) dijelaskan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Adapun peran atau tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru berdasarkan surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengendalikan laju penularan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) baik pada masyarakat umum, kelompok rentan, kelompok resiko tinggi tertular HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan meningkatkan kualitas hidup orang yang telah terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

2. Menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif dengan menitik beratkan pencegahan pada perilaku resiko tinggi tertular HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
3. Menyediakan pelayanan kesehatan berupa layanan Konseling Tes Sukarela (KTS), pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada orang yang telah terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang terintegasi dengan upaya pencegahan.
4. Mengoptimalkan peran serta masyarakat termasuk orang yang telah terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan kelompok populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*)
5. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Donor, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat peduli HIV(*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan Perguruan Tinggi secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhadap penularan atau penyebaran HIV dan AIDS.
6. Meningkatkan upaya pencegahan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) pada semua masyarakat termasuk pada kelompok berisiko tinggi, rentang dan masyarakat umum.
7. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang bermutu, terjangkau, bersahabat dan berkesinambungan bagi populasi kunci dan lorang yang telah terinfeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang terintegasi dengan upaya pencegahan.
8. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*).
9. Terciptanya pengembangan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan pencegahan dan penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*).

Pasal 11 dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 bagian

kesatu yaitu Koordinasi Antar Lembaga menyebutkan juga bahwa :

1. KPA Kota berkoordinasi dengan KPA Provinsi dan KPA Nasional dan pihak terkait lainnya melalui sinkronisasi dan harmonisasi kegiatan sesuai dengan Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS.
2. Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan fasilitas pendukung, mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang mendukung

terhadap pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Adapun langkah pencegahan HIV/AIDS sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru dilakukan melalui cara :

- a. Kegiatan promosi perubahan perilaku, melalui :
 1. Peningkatan fungsi keluarga melalui peningkatan penahanan keluarga;
 2. Komunikasi, informasi dan edukasi;
 3. Peningkatkan penggunaan kondom pada hubungan seks beresiko; dan
 4. Mendorong dan meningkatkan layanan IMS (Infeksi Menular Seksual)
- b. Pengurangan dampak buruk Penggunaan Narkotika yang dilaksanakan dengan cara :
 1. Melibatkan seluruh pihak terkait diberbagai tingkatan pemerintahan; dan
 2. Menyiapkan Puskesmas Harm Reduction untuk menjangkau para pencandu narkotika suntik guna mendapatkan layanan kesehatan dasar serta paket Harm Reduction.
- c. Pencegahan resiko penularan dari ibu ke bayi (*Prevention Mother to Child Transmition/PMTCT*), dilakukan melalui pemberian anti retro viral (ARV) pada masa kehamilan, proses persalinan melalui Caesar serta pemberian pengganti Air Susu Ibu;
- d. Menyelenggarakan kewaspadaan umum (*Universal Precaution*) dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV dan AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- e. Penyelenggaraan KTS HIV dan AIDS yang dilakukan dengan persetujuan tertulis klien (*Informed Consent*);
- f. Pemeriksaan HIV terhadap darah, produk darah, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan, dan
- g. Pemberian materi kesehatan reproduksi termasuk didalamnya tentang IMS dan HIV dan AIDS yang dilakukan dengan cara menurunkan prevalensi IMS melalui pemeriksaan dan pengobatan IMS.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 bagian kedua pasal 6 mengenai Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) Dinas Kesehatan mempunyai tugas:

- a. Melakukan Koordinasi surveilans penyakit dan perilaku HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru,
- b. Mengumpulkan data epidemiologi yang ada,
- c. Meningkatkan pelaksana penggunaan komndom 100% secara bertahap dan jarum suntik sekali pakai dilingkungan kelompok perilaku resiko tinggi
- d. Mengembangkan sisrem dukungan perawatan dan pengobatan untuk ODHA,

Dalam Peraturan Daerah provinsi Rian No. 4 Tahun 2006 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan HIV/AIDS, Penanggulangan epidemi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Provinsi Riau, Pemerintahan Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk :

- a. Melakukan program komunikasi, informasi dan edukasi pencegahan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) yang benar, jelas dan lengkap melalui media massa, organisasi masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kesehatan secara periodik,
- b. Melakukan pendidikan keterampilan hidup dan perilaku hidup sehat dengan tenaga yang kompeten untuk menghindari infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan penyalahgunaan Napza melauai sekolah baik di SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan sederajat, pesantren serta Perguruan Tinggi milik Pemerintah maupun milik swasta,
- c. Mendorong dan melaksanakan konseling dan testing HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) secara sukarela,
- d. Memberikan layanan kesehatan yang spesifik di pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit termasuk pengobatan dengan obat anti infeksi oppotunistik dengan biaya yang terjangkau,
- e. Melaksanakan kewaspadaan Universal Precaution Standae di Rumah Sakit, Poliklinik dan fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun milik swasta sehingga dapat mencegah penyebaran infeksi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) serta dapat melindungi staf dan pekerjaannya,
- f. Melaksanakan skrining yang standard terhadap IMS (Infeksi Menular Seksual), HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan virus hepatitis atas seluruh donor, fraksi darah dan jaringan tubuh yang didonorkan kepada orang lain,
- g. Melaksanakan pengawasan dan penertiban terhadap tempat-tempat yang berpotensi menularkan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) terus melonjak di Indonesia, yaitu karena kemiskinan, tingginya mobilitas penduduk, banyaknya industri seks, masih rendahnya pengetahuan tentang HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) dikalangan kelompok resiko tinggi (resti), terbatasnya sarana medis, kurangnya komitmen pemerintah dalam aplikasi Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*), penggunaan bersama jarum suntik dikalangan pencandu narkotika, kurangnya akses informasi dan pelayanan kesehatan, serta lemahnya aturan dan penegakan hukum.

Di Provinsi Riau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) menjadi peringkat 11 kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) se-Indonesia, dikutip dari *halloriau.com* (2019) “Kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Provinsi Riau saat ini sangat memprihatinkan. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penemuan kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) hingga September 2019, Provinsi Riau menempati urutan 11 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia”.

Berdasarkan kutipan dari *halloriau.com* (2019) “Hasil laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau sevcara kumulatif sejak tahun 2018 yang lalu ada sekitar 2.900 kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan 2.468 kasus AIDS

(*Acquired Immuno Defency Syndrome*). Maka untuk keseluruhan kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Provinsi Riau sejak tahun 2018 totalnya mencapai 5.368 kasus”. Sebab itu untuk kedepan semoga dengan adanya sosialisasi ini, Provinsi Riau bisa mengatasi masalah Narkoba dan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) supaya generasi bangsa kita dapat tetap terpelihara.

Dikutip dari “seriau.com” Di Pekanbaru sendiri kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) semakin meningkat dalam kurun waktu tiga tahun kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kota Pekanbaru terus mengalami peningkatan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru mengklaim sudah sangat maksimal dalam melakukan Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Peduli HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) dan pihak NJO terkait dengan aksi penanganan dan pencegahan penyakit mematikan ini.

Dikutip dari *pekanbaru.go.id* (2019) meningkatnya kasus penderita HIV / AIDS di Kota Pekanbaru diharapkan jadi perhatian serius semua pihak. Baik Dinas Kesehatan (Dinkes) maupun peran serta masyarakat dan instansi-instansi terkait lainnya. Kepada Pemerintah, Anggota DPRD Kota Pekanbaru Kartini berharap, Diskes menaruh perhatian penuh bahkan memprioritaskan tindakan sosialisasi pencegahan HIV / AIDS kepada masyarakat secara komprehensif.

Pasalnya selama ini dilapangan ia melihat sosialisasi mengenai apa itu HIV / AIDS, gejala, dampak dan solusi yang harus dilakukan masih sangat minim.

“Kita minta dilakukan tindakan pencegahan yang komprehensif, lakukan sosialisasi keberbagai lapisan masyarakat mulai dari anak-anak usia sekolah, usia produktif yakni antara 20 hingga 30 tahun yang berada didunia kampus dan dunia kerja, bahkan sosialisasi yang kontiniu hingga tingkat keluarga, jika tidak kasus HIV / AIDS ini akan mengalami tren kenaikan setiap tahunnya.” ujar Kartini. Politisi PAN ini menyakini banyak diantara masyarakat yang kurang tahu dengan HIV / AIDS dan bagaimana langkah pencegahan dan solusi yang harus diambil ketika berhadapan atau mengalami langsung HIV / AIDS. Maka menurut Kartini harus dilakukan sosialisasi yang maksimal baik. “ Pemerintah harus maksimal lakukan sosialisasi dan pencegahan, tentunya juga dibarengi dengan pendekatan agama yang dilakukan oleh keluarga maupun pemerintah dengan berkoordinasi dengan dapartemen agama, “pungkas Kartini. (kominfo9/rd3)

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menemukan beberapa fenomena mengenai HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kota Pekanbaru yaitu:

1. Masih kurangnya Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai informasi HIV/AIDS, dampak dari HIV/AIDS, bagaimana cara Pencegahan, Penanggulangan serta Penularan dari HIV/AIDS
2. Masih kurang berperannya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam menanggulangi HIV/AIDS dan tidak efektifnya SDM (Sumber Daya

Manusia) Komisi Penanggulangan AIDS dalam melakukan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : **Bagaimanakah Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) di Kota Pekanbaru.**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

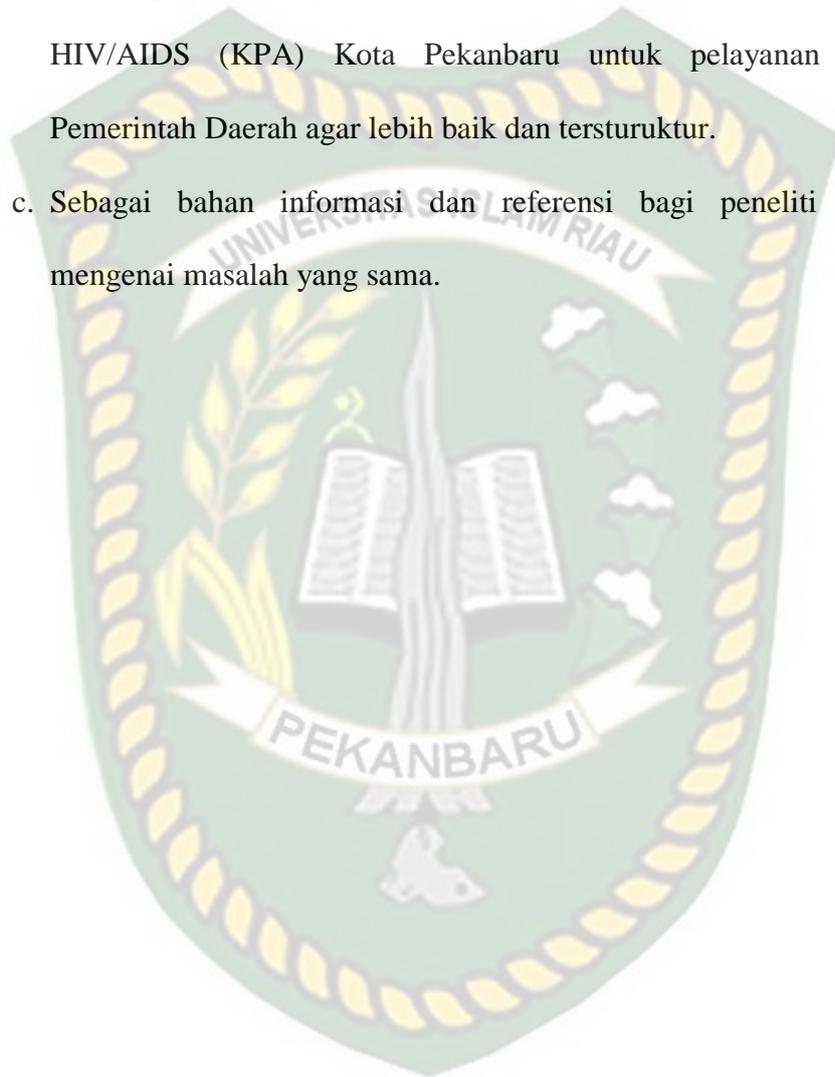
- a. Untuk mengetahui peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam memberikan sosialisasi mengenai HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) dilingkungan masyarakat.
- b. Untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*).
- c. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam melakukan penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti pada khususnya terhadap peran Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Pekanbaru terkait sosialisai

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*).

- b. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Pekanbaru untuk pelayanan di sektor Pemerintah Daerah agar lebih baik dan terstruktur.
- c. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti berikutnya mengenai masalah yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengambil pendapat dari beberapa para ahli sesuai dengan tujuan penelitian. Teori-teori yang diinginkan adalah untuk membangun pemikiran yang bersifat sistematis dan analitik dengan mengidentifikasi dan mengkaji beberapa teori yang relevan sebagai dasar pemecah masalah.

1. Konsep Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah. Dengan demikian Negara merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di Negara tersebut.

Menurut Sedarmayati (2004:9) Pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Sebagaimana kita ketahui, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Menurut Kuper (2004:418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7). Bagian terakhir dari pembedaan terminologi pemerintahan oleh Finner menyisakan satu pengertian yang menarik, yaitu hubungan antara yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurutnya (dalam Kuper, 2004:419) relasi antara pemerintah dan yang diperintah berkaitan dengan sejumlah mana peranan pemerintah dalam melakukan intervensi terhadap warga Negara bagi upaya mencapai tujuan. Dalam fenomena yang lazim, sebagian pemerintah yang menganut paham demokrasi berupaya meminimalisasi intervensi terhadap kebebasan individu.

Menurut Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut yang memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki ketaatan. Dengan demikian Pemerintah memiliki peran sebagai organisasi yang mengatur dan memimpin Negara, menegakkan hukun dan memberantas kekacauan untuk mensejahterakan masyarakat. Tanpa adanya pemerintah tidak mungkin Negara akan berfungsi dengan baik.

Mac Iver dalam Syafiie (2005:22) pemerintah adalah sebagai suatu kekuasaan serta bagaimana manusia itu bias diperintah. Apabila ditinjau dari definisi pemerintahan. Karena kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan yang diberikan. Kekuasaan juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung dengan cara memberi perintah atau dengan tidak langsung dengan menggunakan semua alat dan cara yang tersedia.

Menurut Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep Negara tersebut. Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan. Karena fungsi pemerintah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan bagi masyarakat sebagai wujud pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat.

Dengan demikian pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Konsep Kebijakan Pemerintah

Menurut Edward III (dalam Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran bagi program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

James E Anderson (dalam Tresiana dan Duadji 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan/dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan public adalah: Pertama, kebijakan public merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan Keempat, berbentuk positive dan bias pula berbentuk negative, Ndraha (2008:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumbat pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban actor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan. Kebijakan public menurut Dye (dalam Widodo

2018:13) mengemukakan dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen, yaitu (a) kebijakan publik, (b) pelaku kebijakan, dan (c) lingkungan kebijakan.

Menurut Dunn (2003:107-1090) analisis kebijakan menggunakan berbagai metode pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai masalah-masalah kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Masalah kebijakan (*Policy Problem*) adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi yang tidak dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik.

3. Konsep Organisasi Pemerintahan

Sebelum membahas organisasi pemerintahan terlebih dahulu perlu dibahas masalah organisasi. Organisasi itu sangatlah penting dalam kehidupan kita dan meresap dalam kehidupan masyarakat, karena dalam kenyataannya sebagian besar orang hidup dalam organisasi dan menghabiskan waktu hidup mereka sebagai anggota organisasi (social, pekerjaan, sekolah dan sebagainya). Organisasi dapat dilihat atau ditinjau dari beberapa sudut pandang, antara lain:

1. Organisasi Sebagai Wadah

Organisasi dipandang sebagai wadah mencerminkan bahwa organisasi merupakan tempat dijalankannya aktivitas administrasi dan manajemen. Organisasi sebagai wadah bersifat relative statis. Istilah relative statis digunakan oleh Siagian untuk menjelaskan organisasi sebagai wadah, karena menurut Siagian tidak ada organisasi yang dapat berkembang, tumbuh, dan maju dalam keadaan absolut statis (Siagian,1997:138-141). Apabila organisasi dipandang sebagai wadah aktifitas, maka pola dasar organisasi dan struktur organisasi harus dibuat atas dasar landasan yang kuat dan pemikiran yang matang. Hal ini

dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya perubahan tujuan, perubahan aktivitas, pergantian pemimpin, beralihnya tugas-tugas, yang menuntut adanya perubahan pola dasar dan struktur organisasi tidak harus selalu ikut berubah kalau disusun atas dasar konsepsi yang matang yang mendasarkan kepada perspektif perkembangan organisasi. Wadahnya tetap tetapi tujuan pimpinan dan tugas-tugasnya dapat berubah sesuai dengan tuntutan situasi, kondisi dan perkembangan organisasi. Inilah yang dimaksud organisasi dipandang sebagai wadah.

2. Organisasi Sebagai Proses

Organisasi dipandang sebagai proses mencerminkan kedinamisan aktivitas kerja dalam organisasi. Organisasi sebagai proses menyoroti kedinamisan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi itu. Interaksi ini terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, bahkan antar organisasi. Sudarso menyatakan bahwa bila memandang organisasi sebagai proses, maka didalamnya terdapat pembahsan tentang dua macam hubungan yang terjadi dalam organisasi. Hubungan tersebut adalah : pertama, hubungan-hubungan formal yang menimbulkan formal organization, dan kedua hubungan-hubungan informal dalam organisasi yang menimbulkan informal organization (Sudarso,1988:37).

Hubungan-hubungan formal dalam organisasi telah diatur melalui pola dasar dan struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, dan hirarki kedudukan pejabat yang ada didalam organisasi itu. Hubungan ini menimbulkan kedinamisan kerja antara personel didalamnya. Hubungan ini juga dapat menghasilkan karya

kerja yang dapat dipertanggung jawabkan secara organisatoris. Sebaliknya hubungan formal dalam organisasi tidak diatur dalam pola dasar maupun dalam dasar pendirian organisasi. Hubungan informal ini juga tidak terluhat dari struktur organisasi. Namun demikian, hubungan informal dalam organisasi ini dapat dilihat dengan jelas pada lobby personel dalam mencapai tujuan yang dikehendaki, atau lobby-lobby lainnya. Dasar-dasar hubungan yang bersifat informal ini adalah: (1) hubungan-hubungan pribadi, (2) kesamaan keahlian antar anggota organisasi, (3) kesamaan kepentingan, dan (4) kesamaan kepentingan kegiatan-kegiatan diluar organisasi, misalnya kesamaan hobby bermain golf, mesin tennis, dan kesamaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai tempat atau sarana untuk lobby (Sudarso,1988:38).

3. Organisasi Sebagai Suatu Sistem Prilaku

Organisasi dipandang sebagai suatu sistem prilaku apabila organisasi tersebut lebih dinamis bila dibandingkan dengan organisasi sebagai proses ataupun sebagai wadah. Organisasi sebagai suatu sistem prilaku, didalamnya tercakup input, proses, dan output. Inputnya dapat berupa sekumpulan orang, sarana dan atau praserana organisasi yang dapat dijadikan sebagai masukan untuk proses selanjutnya. Prosesnya dapat berupa interaksi masing-masing atau antar personel yang terlibat dalam organisasi tersebut. Tiap-tiap personnel atau kelompok kerja mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang harus dijalankan dan harus dipertanggung jawabkan secara organisatoris dalam rangka mencapai tujuan. Keluarannya berupa hasil kerja sama dalam melaksanakan sesuatu untuk mencapai tujuana yang sama.

Keluaran ini senantiasa dievaluasi setiap periode tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu organisasi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi umpan balik untuk pengembangan organisasi selanjutnya. Louis Allen memandang organisasi sebagai suatu sistem perilaku kerja sama. Ia mendefinisikan organisasi sebagai berikut : Organisasi adalah suatu sistem mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dirumuskan dengan baik, dan masing-masing pekerjaan itu mengandung sejumlah tugas, wewenang, dan tanggung jawab tertentu, keseluruhannya disusun secara sadar agar orang-orang dari badan usaha itu dapat bekerja sama secara efektif. Dalam mencapai tujuan mereka (dalam Gie, 1974:61).

James L.Gibson c.s (dalam Winardi,2007:13) mengatakan bahwa organisasi-organisasi merupakan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil tertentu yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri. Selanjutnya menurut Hamim (2005:40) bahwa organisasi dan manajemen ikut berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah, seperti halnya yang dikemukakan oleh Max Webber definisi tentang organisasi terdiri atas seorang pemimpin, suatu staff administrasi dan massa anggota-anggotanya.

Yang paling dari peraturan dasar ini adalah peraturan yang membagikan otoritas suatu konsep yang harus dibedakan dari kekuasaan semata-mata untuk melaksanakan kehendak seseorang, karena otoritas didasarkan atas keyakinan seperti itu. Pertama, otoritas kharismatik, kedua otoritas tradisional, ketiga bahwa perintah-perintah didasarkan atas kewajiban-kewajiban didalam suatu kitab peraturan yang mencakup baik, atas maupun bawahan, dan juga atasan-atasannya

dan bawahan-bawahannya disebut otoritas legal rasional. Ini adalah tipe otoritas yang terdapat dalam suatu organisasi modern. Menurut Ndraha (2003:521) birokrasi pemerintahan didefinisikan sebagai struktur pemerintahan yang berfungsi memproduksi jasa public atau layanan civil tertentu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan berbagai pilihan dari lingkungan.

4. Konsep Peranan

Menurut Soejono Soekanto (2017:210) Peranan atau (role) merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang dibuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dalam meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang disekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada didalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Misalnya, norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki harus berjalan bersama seorang wanita, harus disebelah luar.

Peranan yang melekat dalam diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social

position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banya menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan, mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan poisisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Pernanan dalam arti merupakan rangakain peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

5. Penanggulangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara perbuatan menanggulangi. Penanggulangan HIV / AIDS merupakan upaya terpadu dari peningkatan perilaku hidup sehat (promotif), pencegahan penyakit HIV / AIDS (preventif), serta pengobatan dan perawatan (kuratif) dan dukungan hidup (support) terhadap pengidap penyakit HIV / AIDS. Upaya preventif dan promotif merupakan upaya prioritas yang diselenggarakan secara berimbang dengan upaya kuratif dan dukungan terhadap pengidap penyakit HIV / AIDS.

6. HIV (*Human Immunodeficiency Virus*)

Menurut Green, cw (2007) disebut human (manusia) karena virus ini hanya dapat menginfeksi manusia, immune-deficiency karena efek virus ini adalah melemahkan kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan segala penyakit yang menyerang tubuh, termasuk golongan virus karena salah satu karakteristiknya adalah tidak mampu memproduksi diri sendiri, melainkan memanfaatkan sel-sel tubuh. Sel darah putih manusia sebagai sel yang berfungsi untuk mengendalikan atau mencegah infeksi oleh virus, bakteri, jamur, parasite, dan beberapa jenis kanker diserang oleh HIV yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit.

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh, dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga rentan diserang berbagai penyakit.

7. AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Virus*)

Dewa Putu Yudi Pradita (2014:19) Adapun ancaman terbesar saat ini yang dihadapi khususnya oleh Indonesia adalah HIV dan AIDS merupakan singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome disingkat (AIDS) adalah suatu sekumpulan gejala yang ditimbulkan oleh virus kekebalan tubuh manusia. Virus tersebut dinamakan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I: Penelitian Terdahulu Terkait Dengan Peran Komisi Penanggulangan HIV dan AIDS Dalam Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru

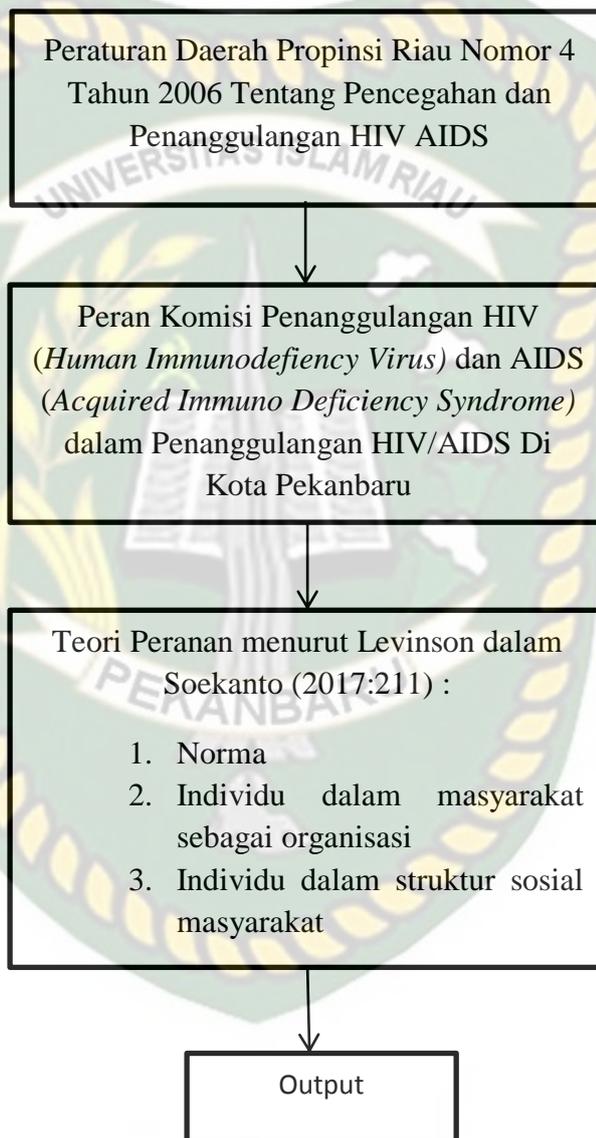
Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan penelitian dengan penulis
1	2	3
<p>✓ Skripsi Resti Rahma Sari yang dibuat tahun 2018 yang berjudul Peranan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mencegah Dan Menanggulangi HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru.</p>	<p>✓ Hasil penelitian adalah bahwa peran Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dalam mencegah penularan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru secara keseluruhan sudah berperan sedangkan untuk penanggulangan HIV dan AIDS yang diukur dengan indikator mendorong dan melaksanakan pemeriksaan HIV melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat dan memberikan penanganan HIV dan AIDS dilakukan melalui upaya perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap orang yang terinfeksi HIV dan AIDS, salah satu bentuk yang menjadi faktor penghambat adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai HIV dan AIDS, dan sebagian besar kelompok berisiko tinggi masih beranggapan bahwa dirinya sehat dan menyulitkan memobilisir kelompok berisiko tinggi.</p>	<p>✓ Penelitian mengambil kasus tentang HIV dan AIDS pada tahun 2018</p> <p>✓ Sedangkan penulis mengambil kasus penelitian HIV dan AIDS pada tahun 2020</p> <p>✓ Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif</p> <p>✓ Sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif</p> <p>✓ Penelitian mengambil fokus ke pencegahan dan penanggulangan mengenai HIV dan AIDS</p> <p>✓ Sedangkan penulis mengambil dan berfokus pada penanggulangan HIV dan AIDS mengenai sosialisasi.</p>
<p>✓ Skripsi Andesca Putra yang dibuat tahun 2019 yang berjudul Analisa Peran Komisi Penanggulangan AIDS 1 (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan HIV Dan</p>	<p>✓ Hasil penelitian menggambarkan bahwa melihat dari beberapa indikator yang pertama adalah pencegahan yang dapat di simpulkan bahwa program Pencegahan KPA Kota Pekanbaru ini belum berjalan</p>	<p>✓ Peneliti mengambil kasus HIV dan AIDS pada tahun 2019 Sedangkan penulis mengambil kasus Penelitian HIV dan AIDS pada tahun 2020</p> <p>Peneliti mengambil fokus</p>

1	2	3
AIDS Di Kota Pekanbaru.	✓ dengan baik karena di sebabkan oleh kurang koordinasi antara pihak, sumber daya manusia serta sumber daya politik sehingga dalam perjalanan pencegahan dan penanggulangan belum dapat maksimal, semua itu yang harus lebih di tingkatkan lagi.	✓ penelitian pada pencegahan program HIV dan AIDS ✓ Sedangkan penulis mengambil dan berfokus pada penanggulangan HIV dan AIDS mengenai sosialisasi.
✓ Skripsi Rizki Ananda dibuat tahun 2012 yang berjudul Evaluasi Program Pemerintah Tentang HIV Dan AIDS Di Kota Pekanbaru.	✓ Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan program adalah pengurangan HIV dan AIDS karena terbatasnya jumlah dana anggaran yang disediakan untuk KPA terbatas sehingga tidak cukup untuk melaksanakan program kerja terutama bekerja dalam program pencegahan AIDS Di Kota Pekanbaru serta masih kurangnya sarana dan prasarana dalam program kerja terutama bekerja dalam program pencegahan HIV dan AIDS.	✓ Peneliti mengambil kasus HIV dan AIDS pada tahun 2012 ✓ Sedangkan penulis mengambil kasus HIV dan AIDS pada tahun 2020 ✓ Peneliti mengambil fokus penelitian pada program kerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam pencegahan ✓ Sedangkan penulis mengambil dan berfokus pada kasus HIV dan AIDS mengenai sosialisasi.

Sumber: Modifikasi Olahan Penulis 2020

B. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Menanggulangi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) Di Kota Pekanbaru



C. Konsep Operasional

Untuk menghilangkan serta menghindari kesalah pahaman beberapa konsep atau istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan negara guna menyelenggarakan kesejahteraan rakyat serta kepentingan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dari pemerintahan pusat sampai daerah.
2. Kebijakan Pemerintah adalah sebuah keputusan yang dibuat secara sistematis oleh Pemerintah dengan maksud serta tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.
3. Organisasi Pemerintahan adalah organisasi tertinggi yang memimpin dan anggotanya biasanya berasal dari organisasi non pemerintah misalnya dari organisasi politik (organisasi non pemerintah) ke organisasi pemerintah.
4. Peranan adalah tindakan yang dikatakan individu atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, dan merupakan pembentuk tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan di masyarakat.
5. Penanggulangan adalah upaya yang dilakukan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru agar virus HIV dan AIDS tidak menyebar luas dilingkungan masyarakat.
6. Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh

manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

7. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat infeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*).
8. Norma adalah aturan-aturan yang dijadikan sebagai acuan dalam pengawasan.
9. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu itu dalam suatu organisasi.
10. Individu dalam struktur sosial masyarakat adalah suatu tingkatan dalam masyarakat

D. Operasional Variabel

Tabel II.2: Konsep Operasional Variabel Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Menanggulangi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Soejono Soekanto (2017:210) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan	Peran KPA di kota Pekanbaru	1. Norma	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aturan-aturan mengenai (penanggulangan HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) dan AIDS (<i>Acquired Immuno Defeciency Syndrome</i>). 2. Aparatur Negara dalam melakukan pengawasan atau berperan dalam penanggulangan HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) dan AIDS (<i>Acquired Immuno Defeciency Syndrome</i>).

1	2	3	4
hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan (<i>Dalam Sosiologi Suatu Pengantar</i>).		2. Individu dalam masyarakat sebagai organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terkena HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) dan AIDS (<i>Acquired Immuno Defeciency Syndrome</i>). 2. Menyediakan dan memberikan pelayanan serta peralatan untuk pengidap penyakit HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) dan AIDS (<i>Acquired Immuno Defeciency Syndrome</i>)
		3. Individu dalam struktur sosial masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepedulian dalam melakukan sosialisasi mengenai HIV (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) dan AIDS (<i>Acquired Immuno Defeciency Syndrome</i>). 2. Meningkatkan perawatan dan pengobatan serta melakukan hubungan komunikasi yang baik dan memberikan informasi secara akurat.

Sumber : Modifikasi Olahan Penulis 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian metode kualitatif bentuknya studi kasus dengan tipe deskriptif, jenis penelitian ini berupa menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variable yang diteliti, dalam hal ini adalah “Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) (KPA) Di Kota Pekanbaru”

Kemudian melalui pendekatan kualitatif (Creswell, 2002:3) menyatakan bahwa “Penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) (KPA) Di Kota Pekanbaru karena penulis menetapkan lokasi penelitian ini dengan pertimbangan karena di Kota Pekanbaru dijumpai fenomena-fenomena yang berkaitan erat dengan masalah yang penulis teliti yaitu kurangnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam menanggulangi HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dan Kota Pekanbaru yang merupakan Kabupaten/Kota yang kasus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) nya yang paling tinggi di Provinsi Riau.

C. Informan Penelitian

Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis *purposive*, yaitu pemilihan informan berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Pemilihan informan secara *purposive* ini dimaksudkan agar informan yang dipilih itu dapat memahami dan menjelaskan serta memberi informasi secara akurat terhadap permasalahan dalam penelitian ini untuk melihat peran Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) dalam Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) Di Kota Pekanbaru.

Tabel III.1 : Informan Peran Komisi Penanggulangan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) Dalam Penanggulangan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Deficiency Syndrome*) di Kota Pekanbaru.

No	Nama/Kedudukan	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Hasan Supriyanto, SP	Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	S1
2	Hudzalifah, Amd	Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	D3
3	Yeni Safitri, SKM	Penanggung Jawab Program HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru	S1
4	Hedra, Spd	Koordinator Program	S1
5	Pengidap HIV dan AIDS (SM)	-	SMP
6	Pengidap HIV dan AIDS (WY)	-	SMA
7.	Pengidap HIV dan AIDS (RN)	-	SMA
8.	Pengidap HIV dan AIDS (KS)	-	SMA
9.	Netty Indrawati	Masyarakat	SMA
10	Sumarni	Masyarakat	SMA

Sumber : Modifikasi Olahan Penulis, 2020

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden berdasarkan kerangka peniliti ini, berupa data tentang identitas responden, dan data hasil kusioner dan wawancara dan sebagainya.

2. Data Sekunder

Adalah data pendukung yang telah ada atau bersedia seperti catatan dan dokumen yang mendukung penelitian, berupa data monografi, demografi, dan data sekunder lainnya yang dianggap perlu.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dipenelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Yaitu peneliti dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Peneliti dalam wawancara bebas namun tetap terikat dengan pokok-pokok masalah dan tujuan penelitian (wawancara bertahap/bebas terpimpin).

2. Observasi

Yakni peneliti melakukan pengamatan secara langsung dilapangan terhadap objek untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari informan dengan fakta yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi

Yaitu teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data dilapangan terkumpul maka data tersebut kemudian dikelompokkan dan ditabulasikan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam menjelaskan hasil penelitian, untuk kemudian di analisa secara deskriptif, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.



G. Jadwal Penelitian

Tabel III.2: Jadwal waktu penelitian tentang Pengawasan Dinas Perhubungan terhadap Truk Bertonase Berat di Jalan Umum Kota Pekanbaru.

No	Keterangan	Bulan ke									
		Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Penyusunan UP	X									
2	Seminar UP		X								
3	Revisi UP		X								
4	Revisi Kuisisioner			X							
5	Rekomendasi Survey			X							
6	Survey Lapangan				X						
7	Analisis Data					X					
8	Penyusunan laporan Hasil Penelitian						X				
9	Konsultasi Revisi Skripsi							X			
10	Ujian Komprehensif Skripsi								X		
11	Revisi Skripsi								X		
12	Penggandaan Skripsi									X	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Pekanbaru lahir sebelum masuknya penjajahan Belanda ke Indonesia. Pada waktu itu baru berupa dusun yang bernama Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi Sungai Siak (diseberang pelabuhan yang ada saat ini). Kemudian di zaman kerajaan Siak Sri Indrapura yang dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah, dusun ini berkembang dan pusatnya berpindah keseberang sekitar pasar bawah yang kemudian bernama Senapelan.

Selanjutnya berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar) negeri Senapelan diganti namanya menjadi Pekanbaru. Pergantian ini terjadi pada masa Pemerintahan Sultan Mohammad Ali Mauzan Syah (1684-1801). Pada waktu penjajahan Belanda, berdasarkan Besluit Van Her Inlanche Zelf Bestuur Van Siak No. 1 Tahun 1919 Pekanbaru menjadi tempat kedudukan controluer (PHB) pemerintahan Belanda.

Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi GUN yang dipakai oleh GUN CHO dan tempat kedudukan Riau SYUTJOUKANG. Akhirnya dizaman Pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi :

1. Hemente Pekanbaru dan merupakan ibukota Keresidenan Riau berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan No. 103 Tanggal 1 Mei Tahun 1946.
2. Kota kecil berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1956.
3. Kotapraja berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1957.
4. Kotamadya berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

B. Kondisi Geografis Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu yang ada di Provinsi Riau yang menyandang sebagai Ibu Kota Pekanbaru Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Pekanbaru merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26 Km² dan secara astronomis terletak diantara 0° 25` - 0° 45` lintang utara dan 101° 14` - 101° 34` bujur timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Dibagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak.
2. Dibagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
3. Dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.
4. Sedangkan dibagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas serta ketertiban dalam penggunaan fasilitas umum seperti jalan dan kendaraan, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kabupaten yaitu, Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Dumai, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir, Tenayan Raya dan Kelurahan Desa.

Kota Pekanbaru dibelah oleh anak Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. Memiliki beberapa anak sungai anantara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Sekutul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan, dan Sungai Sail. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman menuju perkotaan serta daerah lainnya.

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C – 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C – 23,0°C. Curah hujan antara 38,6 – 43,0 mm/tahun dengan keadaan musim kemarau berkisar jatuh pada bulan Mei – Agustus, kelembapan maksimum antara 96% - 100% dan kelembapan minimum 46% - 62%.

C. Pemerintahan

Kota Pekanbaru dipimpin oleh Walikota yang disingkat oleh Gubernur. Penyelenggaraan roda Pemerintahan Kota Pekanbaru dipusatkan pada kantor Gubernur Kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari unsur Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Walikota, dan masing-masing kepala seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Pembangunan, dan kelompok jabatan fungsional. Kota Pekanbaru telah dipimpin oleh 15 Walikota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel IV.1 : Nama-nama Pejabat Walikota yang Pernah Memerintah Kota Pekanbaru

NO	NAMA PEJABAT	MASA PEJABAT
1	2	3
1.	Datuk Wan Abdul Rahman	17 Mei 1946 - 11 November 1950
2.	Datuk Wan Ahmad	11 November 1950 - 07 Mei 1953
3.	Tengku Ilyas	07 Mei 1953 - 01 Juni 1956
4.	Muhammad Yunus	01 Juni 1956 - 14 Mei 1958
5.	Oka Jamil	14 Mei 1958 - 09 November 1959
6.	Datuk Wan Abdul Rahman	09 November 1959 - 29 Maret 1962
7.	Tengku Bay	29 Maret 1962 - 01 Juni 1968
8.	Raja Rusli, BA	01 Juni 1968 - 10 Desember 1970
9.	Abdul Rahmad Hamid	10 Desember 1970 - 05 Juli 1981
10.	H. Ibrahim Arsyad , SH	05 Juli 1981 - 21 Juli 1986
11.	Drs. Farouq Alwi	21 Juli 1986 - 22 Juli 1991
12.	H. Oesman Effendi Apan, SH	22 Juli 1991 - 18 Juli 2001

1	2	3
13.	Drs. H. Herman Abdullah, MM	18 Juli 2001 - 17 Juli 2006
14.	Drs. H. Herman Abdullah, MM	17 Juli 2006 - 18 Juli 2011
15.	H. Firdaus, ST, MT	25 Januari 2012 - Sekarang

Sumber :Badan Pusat Statisti Kota Pekanbaru 2019

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan sosial. Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan yang dimanan setiap kecamatan mempunyai jumlah yang berbeda-beda.

1. Penduduk

Masalah Penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia, untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang terkendali akan sulit dicapai. Penduduk Kota Pekanbaru sangat multi etnis dan heterogen, pertumbuhan penduduk yang tinggi di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa hal lainnya diantaranya :

- a. Fungsi Kota merupakan pusat pemerintah, perdagangan, pendidikan, jasa, industri dan maskapai asing.
- b. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru
- c. Tingginya tingkat ubranisasi di Kota Pekanbaru
- d. Merupakan daerah lintas antar provinsi yang mengakibatkan banyaknya pendatang di Kota Pekanbaru
- e. Perkembangan perkebunan di *Hinterland* Kota.

Junlah penduduk yang bermukim di kawasan barat dan selatan kota sekitar 70% dari total jumlah penduduk, sedangkan dikawasan utara dan timur Kota hanya 30%. Hal ini disebabkan karena pembangunan Kota selama ini lebih terkonsentrasi di kawasan Barat dan Selatan Kota Pekanbaru.

Tabel IV.2 : Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Penduduk	Kepadatan Penduduk
1.	Tampan	59,81	191.941	3.209,18
2.	Payung Sekaki	43,24	97.667	2.258,72
3.	Marpoyan Damai	29,74	139.707	4.677,61
4.	Bukit Raya	22,05	104.519	4.740,09
5.	Tenayan Raya	171,27	140.359	819,52
6.	Lima Puluh	4,04	43.675	10.810,64
7.	Sail	3,26	22.766	6.983,44
8.	Pekanbaru Kota	2,26	26.862	11.885,84
9.	Sukajadi	3,76	49.123	13.064,63
10.	Senapelan	6,65	38.004	5.714,89
11.	Rumbai	128,85	72.338	561,41
12.	Rumai Pesisir	157,33	72.070	458,08
Jumlah		632,26	1.076,025	1.580,10

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka 2019

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Kecamatan Tampan yang mendominasi jumlah Penduduk terbesar yaitu 191.941, sedangkan Kecamatan Sail merupakan Kecamatan yang penduduknya terendah 22.766.

Kondisi Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum 32,4°C - 33,8°C dan suhu terdapat dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Masalah Penduduk di Kota Pekanbaru sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Dibawah ini akan dipaparkan banyak penduduk menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru tahun 2019 dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kota Pekanbaru Tahun 2019

No	Kecamatan	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
1.	Tampan	98.620	93.321
2.	Bukit Raya	50.654	46.983
3.	Senapelan	71.264	68.443
4.	Sukajadi	53.265	51.254
5.	Tenayan Raya	72.188	68.171
6.	Marpoyan Damai	21.583	22.092
7.	Rumbai	11.313	11.453
8.	Lima Puluh	13.792	13.070
9.	Pekanbaru Kota	24.183	24.940
10.	Sail	18.648	19.320
11.	Rumbai Pesisir	36.466	35.872
12.	Payung Sekaki	36.919	35.151
Jumlah		508.961	490.070

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2019

Berdasarkan tabel IV.3 diatas dapat dilihat jumlah penduduk menurut Kecamatan dan jenis kelamin di Kota Pekanbaru. Jumlah Jenis Kelamin laki-laki sebanyak 508.961 jiwa dan jumlah jenis kelamin perempuan sebanyak 490.070 jiwa. Maka yang mendominasi jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin adalah penduduk laki-laki. Selanjutnya dibawah ini akan dipaparkan jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019

No.	Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	0-40	57.614	54.079	111.693
2.	05-09	48.922	45.050	93.972
3.	10-14	42.644	39.996	82.640
4.	15-19	42.589	42.777	85.366
5.	20-24	55.802	58.218	114.020
6.	25-29	54.830	54.416	109.246
7.	30-34	44.156	43.917	88.073

1	2	3	4	5
8.	35-39	41.928	39.645	81.573
9.	40-44	35.383	32.519	67.902
10.	45-49	28.359	25.781	54.137
11.	50-54	21.502	18.986	40.488
12.	55-59	14.963	13.418	28.381
13.	60-64	9.074	8.421	17.495
14.	65-69	5.215	5.165	10.384
15.	70-74	3.397	3.397	7.160
16.	75+	2.586	2.586	6.501
Jumlah		508.961	490.070	999.031

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2019

Diketahui dari data diatas, jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut kelompok umur dan jenis kelamin terlihat bahwa yang menominasi pada jenis kelamin laki-laki yaitu 57.614 dengan kelompok umur 0-40, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan yang mendominasi yaitu 58.218 dengan kelompok umur 20-24.

D. Gambaran Umum Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Komisi Penanggulangan AIDS pertama kali dibentuk pada tahun 1994. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru terletak di Jalan Garuda tepatnya di Puskesmas Sidomulyo, Kec. Tampan Kota Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994, tetapi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum begitu efektif karena belum semua pemerintah daerah membentuk Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), maka pemerintah memperbarui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tersebut dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2004, tahun 2002 Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota mulai aktif, dengan adanya Perpres 75 Tahun 2004 Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menjadi lebih kuat yaitu :

1. Adanya penunjukan sekretaris yang memimpin kelembagaan,
2. Adanya dukungan pendanaan dari IPV melalui UNDP, setelah dana keluar Komisi Penanggulangan AIDS mulai aktif termasuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru.

Adapun peran atau tugas KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013, maka diterapkan :

Kesatu : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru Tahun 2013

Kedua : Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru mempunyai tugas:

- a. Mencegah dan mengendalikan laju penularan HIV dan AIDS baik pada masyarakat umum, kelompok rentan, kelompok beresiko tinggi tertular HIV dan meningkatkan kualitas hidup orang yang telah terinfeksi.
- b. Menyebarkan informasi dan menciptakan suasana kondusif dengan menitikberatkan pencegahan pada perilaku resiko tinggi tertular HIV.
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan berupa layanan Konseling Tes Sukarela (KTS), Pengobatan, Perawatan dan Dukungan kepada orang yang telah terinfeksi HIV yang terintegrasi dengan upaya pencegahan.
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat termasuk orang yang telah terinfeksi HIV dan kelompok populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- e. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Donor, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi Masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV dan AIDS.
- f. Meningkatkan upaya pencegahan HIV dan AIDS pada semua masyarakat termasuk pada kelompok resiko tinggi, rentan, dan masyarakat umum.
- g. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang bermutu, terjangkau, bersahabat, dan berkesinambungan bagi populasi kunci dan orang yang telah terinfeksi HIV terintegrasi dengan upaya pencegahan.
- h. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

- i. Terciptanya pengembangan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS

Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dibantu oleh tim pelaksana/Kelompok Kerja/Panel Ahli/Tim Asistensi/Tim Sekretariat yang bersifat isidentil sesuai kebutuhan dan diusulkan oleh Sektretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pelaksana Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru.

Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru di koordinir oleh KPA Kota yang di ketuai oleh Walikota dan Wakil Walikota sebagai ketua Pelaksana serta melibatkan lembaga donor, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Terkair, LSM, dan Organisasi Profesi, secara intensif, terpadu, dan terkoordinasi. Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

E. Visi Dan Misi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Adapun Visi dan Misi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. VISI

Terwujudnya masyarakat Pekanbaru yang bebas infeksi, diskriminasi dan kematian akibat HIV/AIDS.

2. MISI

Guna menjabarkan Visi maka dibuat Misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya IMS dan HIV melalui pencegahan dan penanggulangan.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator, dinamisator, dan motivator utama dalam pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.
- c. Mengkoordinir dan mengevaluasi semua program dan pendanaan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan IMIS, HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru.
- d. Memperkuat LSM, Masyarakat, ODHA/OHIDA, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda TNI dan POLRI serta tokoh masyarakat lainnya sebagai pelaku utama dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru.
- e. Mengembangkan sikap kebersamaan, kemanusiaan, menghargai, dan menghormati di kalangan masyarakat terhadap ODHA,
- f. Membangun sistem Informasi dan pangkalan data IMS, HIV, dan AIDS Kota Pekanbaru.

F. Uraian Tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru dibentuk dalam rangka meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang lebih menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.. Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Presiden.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru sebagai penanggung jawab upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia

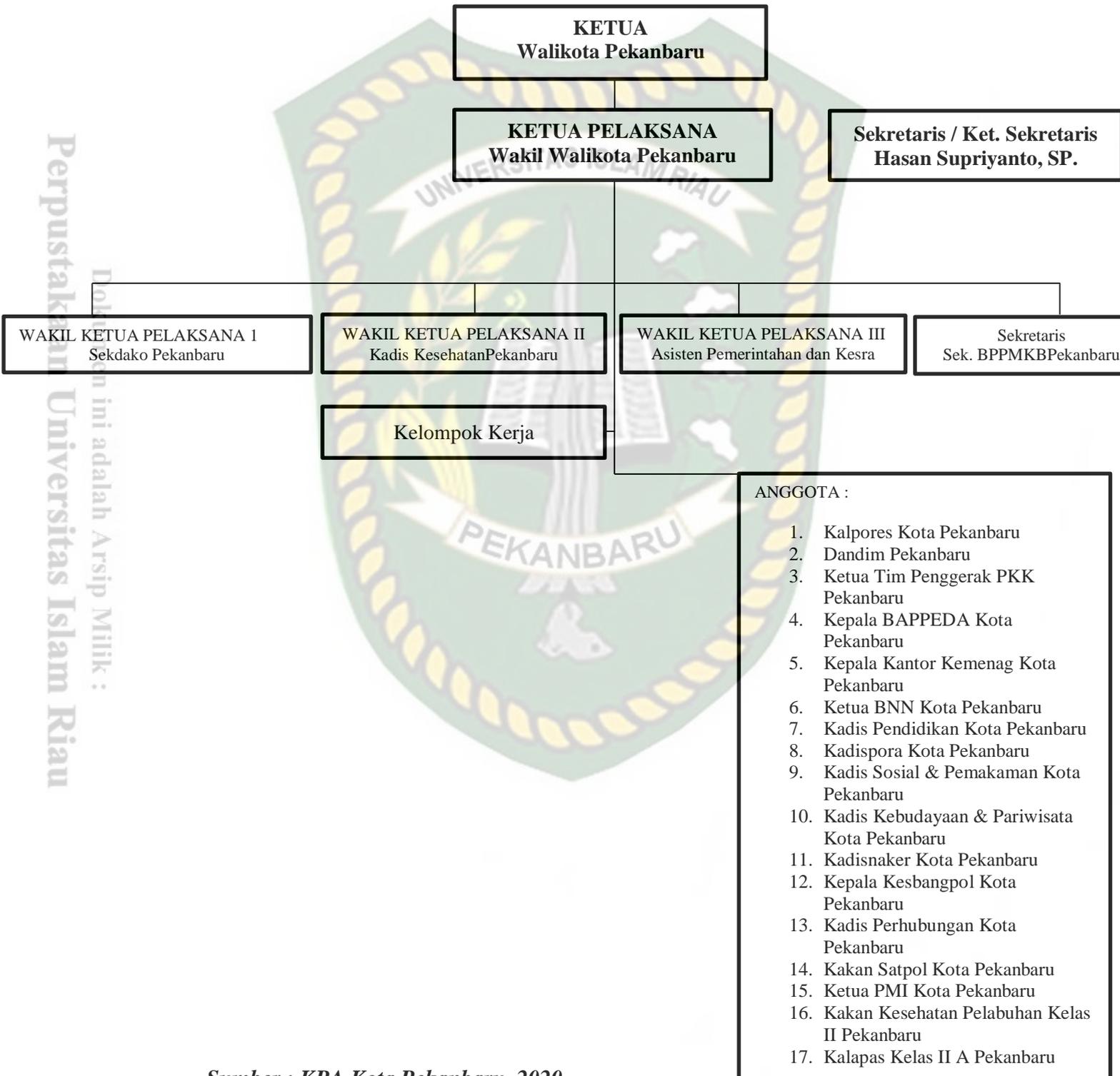
mempunyai tugas yang sangat berat sehingga memerlukan kewenangan yang jelas untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efektif. Tugas Pokok dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Perpres No.75 Tahun 2006 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan dan rencana strategis nasional serta pedoman umum pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS
2. Menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pencegahan, pelayanan, pemantauan, pengendalian dan penanggulangan AIDS
4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai AIDS kepada berbagai media massa, dalam kaitan dengan pemberitaan yang tepat dan tidak menimbulkan keresahan masyarakat
5. Melakukan kerjasama regional dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
6. Mengkoordinasikan pengelolaan dan informasi yang terkait dengan masalah AIDS
7. Mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS
8. Memberikan arahan kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan AIDS

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten/Kota dibentuk dan dipimpin masing-masing oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, KPA di daerah membantu kelancaran pelaksanaan tugas KPA Nasional. Tugas pokok dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Memimpin, mengelola, dan mengkoordinasikan kegiatan pencegahan, pengendalian dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayahnya.
2. Menghimpun, menggerakkan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat , daerah, masyarakat dan bantuanluar negeri secara efektif dan efisien.
3. Melakukan bimbingan dan pembinaan kepada pemangku kepentingan dalam pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan HIV/AIDS di wilayah kerjanya.
4. Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS dan menyampaikan laporan berkala secara berjenjang kepada KPA Nasional.

Struktur Organisasi
Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Kota Pekanbaru
Sek. Walikota Nomor 331 Tahun 2017



Sumber : KPA Kota Pekanbaru, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), Penanggung Jawab HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pengidap HIV/AIDS, dan Masyarakat.

1. Identitas Responden berdasarkan jenis Kelamin untuk melengkapi data penelitian, maka penulis mencantumkan identitas responden yang akan memuat jenis kelamin dari responden dalam penelitian ini.

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-Laki	3	30%
2.	Perempuan	7	70%
	Jumlah	10	100%

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan 2020)

2. Identitas Responden berdasarkan umur dari hasil wawancara di lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden berdasarkan umur.

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase
1.	20-30 tahun	1	10%
2.	31-40 tahun	2	20%
3.	41-50 tahun	7	70%
4.	>50 tahun	-	-
	Jumlah	10	100%

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan 2020)

3. Identitas Responden berdasarkan tingkat Pendidikan dari hasil lapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden tingkat pendidikan.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	-	-
2.	SLTP	1	10%
3.	SLTA	5	50%
4.	Diploma	1	10%
5.	Sarjana	3	30%
	Jumlah	10	100%

Sumber :Hasil Penelitian Lapangan 2020)

B. Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru yang saat ini masih kurang berperan. Penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) merupakan suatu syndrome/kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh Retrovirus yang menyerang sistem kekebalan atau pertahanan tubuh.

Penyakit HIV/AIDS telah menjadi masalah internasional karena dalam waktu singkat terjadi peningkatan jumlah kasus penderita HIV/AIDS. Dengan demikian, ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Negara-negara maju dan berkembang untuk mengurangi jumlah peningkatan kasus HIV/AIDS dengan memberikan dukungan, arahan, sosialisasi, dan badan-badan yang terkait juga harus ikut langsung ikut andil dalam mencegah penularan HIV/AIDS.

Masalah penyakit HIV/AIDS di Indonesia semakin memprihatinkan seperti yang sudah dapat dilihat dari data-data yang diperoleh, survey-survey maupun

hasil dari wawancara mengenai kasus HIV/AIDS yang semakin meningkat jumlah kasusnya. Beberapa tahun belakangan ini kasus HIV/AIDS meningkat tajam diseluruh Indonesia. Penyakit HIV/AIDS ini terutama dipicu oleh para penyalahgunaan suntik narkoba, LSL (Lelaki Suka Lelaki), para pekerja seks komersil, remaja dan Ibu Rumah Tangga (IRT). Peningkatan kasus penularan penyakit HIV/AIDS dikalangan kelompok beresiko di beberapa daerah di Indonesia menjadi salah satu indikator kenaikan kasus yang cukup mengkhawatirkan.

Peningkatan jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau adalah fenomena yang harus segera ditindak lanjuti dengan berbagai upaya. Pihak-pihak yang berkegiatan mengenai penanggulangan HIV/AIDS ini harus ikut andil untuk berperan menanggulangi penyakit HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS ini sudah menjadi ancaman epidemik yang perlu perhatian dari semua kalangan pemerintah, swasta maupun masyarakat. Dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau maka Kota Pekanbaru merupakan Kabupaten/Kota yang paling banyak ditemukan kasus HIV/AIDS yaitu sebanyak 2.670 kasus. Seiring dengan tingginya jumlah tingkat pertumbuhan penduduk serta perkembangan zaman Kota Pekanbaru juga memiliki permasalahan yang sangat mengkhawatirkan salah satunya adalah penyakit HIV/AIDS.

Perkembangan jumlah kasus HIV/AIDS di Kota Pekanbaru belakangan ini menjadi ancaman epidemik yang semakin sangat mengkhawatirkan karena sebagian besar orang dengan HIV/AIDS ditemukan pada kelompok umur produktif yaitu rentang usia 22-49 tahun. Masalah HIV/AIDS ini sudah masuk

kesemua lapisan masyarakat Kota Pekanbaru hal ini dapat dilihat dengan ditemukannya kasus HIV/AIDS di berbagai golongan masyarakat.

Untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan yang lebih komperhensif, diperlukan program-program yang mendukung dan terpadu pada Kabupaten/Kota sehingga diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan jumlah kasus HIV/AIDS di Provinsi Riau dan Di Kota Pekanbaru khususnya.

Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) selaku koordinator upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru, sangat diharapkan peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) untuk menekan laju jumlah kasus penyebaran HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui bagaimana Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota Pekanbaru dapat dilihat dari beberapa indikator tersebut :

A. Norma

Norma merupakan aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi individu maupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berperilaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu norma memiliki kekuatan sifatnya memaksa. Peranan merupakan proses dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Selain itu juga melihat seberapa pemahaman oleh pemerintah serta masyarakat mengenai peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di Kota Pekanbaru tersebut.

Norma juga diartikan sebagai peraturan atau petunjuk hidup yang memberikan arahan untuk, perbuatan yang mana boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat. Serta sebagai petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu organisasi yang mana peraturan itu diwajibkan untuk ditaati oleh masyarakat dan organisasi, jika melanggar maka akan ada tindakan dari Pemerintah.

1. Aturan-aturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

Aturan-aturan tersebut merupakan suatu pedoman agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Karena, apabila tidak ada aturan maka antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat bisa menimbulkan kesenjangan dan manusia pun bisa bertindak sewenang-wenangnya tanpa adanya kendali dan sulit diatur. Dengan adanya aturan tersebut peranan dapat dilakukan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Supriyanto, SP Selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menyatakan bahwa :

“Mengenai aturan-aturan hukum tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sudah ada dijelaskan di Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru”

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa aturan-aturan hukum terkait pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ada aturan hukum yang dimuat dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru terdapat pada pasal 2. Upaya Pencegahan dan

Penanggulangan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilakukan melalui upaya :

- a. Mencegah dan mengendalikan laju penularan HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan AIDS (*Acquired Immuno Defency Syndrome*) baik pada masyarakat umum, kelompok rentan, kelompok resiko tinggi tertular HIV dan meningkatkan kualitas hidup orang yang telah terinfeksi HIV/AIDS.
- b. Menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif dengan menitikberatkan pencegahan pada perilaku resiko tinggi tertular HIV.
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan berupa layanan Konseling Tes Sukarela (KTS), pengobatan, perawatan, dan dukungan kepada orang yang telah terinfeksi HIV yang terintegasi dengan upaya pencegahan.
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat termasuk orang yang telah terinfeksi virus HIV dan kelompok populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
- e. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Donor, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Masyarakat peduli HIV/AIDS, Organisasi Keagamaan, Perguruan Tinggi secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhadap penularan atau penyebaran HIV/AIDS
- f. Meningkatkan upaya pencegahan HIV/AIDS pada semua masyarakat termasuk pada kelompok beresiko tinggi, rentan dan masyarakat umum.
- g. Menyediakan dan meningkatkan pekayanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang bermutu, terjangkau, bersahabat, dan berkesinambungan bagi populasi kunci dan lorong yang telah terinfeksi HIV yang terintegasi dengan upaya pencegahan
- h. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
- i. Terciptanya pengembangan kemitraan diantara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Hudzalifah, Amd Selaku

Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menyatakan bahwa :

“Menegenai aturan-aturan hukum tentang peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sudah ada dijelaskan di dalam Peraturan Walikota tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil wawancara penulis dapat menganalisis bahwa aturan-aturan hukum tentang Pencegahan dan Penanggulangan terdapat dalam Peraturan Walikota

Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang terdapat pada Bab 2 Pasal 2. Namun berdasarkan hasil observasi penulis menemukan bahwa hingga saat ini peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum efektif dalam mencegah dan menanggulangi kasus HIV yang terjadi di Kota Pekanbaru yang dimana jumlah angka kasus penderita HIV yang bertambah, dan penulis juga mendapatkan informasi mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang efektif serta keterbatasan fasilitas/tempat dari kantor Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) itu sendiri masih terbatas dan dana yang dibutuhkan Koimisi Penanggulangan AIDS masih kurang dari pemerintah sehingga Pencegahan dan Penanggulangan itu pun belum berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yeni Safitri, SKM selaku Penanggung Jawab HIV/AIDS Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Sudah ada aturan-aturan yang terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS tentang Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru”

Dari hasil wawancara diatas, penanggung jawab HIV/AIDS tersebut tidak menyebutkan aturan-aturan hukum mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Namun aturan-aturan hukum mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS pada bab 2 pasal 2 :

- a. Mencegah dan mengendalikan laju penularan HIV/AIDS baik pada masyarakat umum. Kelompok rentan, kelompok resiko tinggi tertular HIV dan meningkatkan kualitas hidup orang yang telah terinfeksi HIV

- b. Menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif dengan menitikberatkan pencegahan pada perilaku resiko tinggi tertular HIV
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan berupa layanan Konseling Tes Sukarela (KTS), Pengobatan, Perawatan, dan dukungan kepada orang yang telah terinfeksi HIV yang terintregasi dengan upaya pencegahan
- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat termasuk orang yang telah terinfeksi HIV dan kelompok populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AIDS
- e. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Donor, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Organisasi Kepemudaan, Organisasi Keagamaan, Organisasi masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hedra, Spd Selaku Koordinator Program LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan Utama Group menyatakan bahwa :

“Menegenai aturan-aturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan yang terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 Ibuk tersebut tidak mengetahui adanya peraturan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Yayasan Utama Group penulis dapat menyimpulkan bahwa Ibuk tersebut tidak mengetahui aturan hukum dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru yang dimana seharusnya mereka mengetahui bentuk dari pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sesuai dengan Peraturan yang sudah ada yaitu pada Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 :

- a. Mencegah dan mengendalikan laju penularan HIV/AIDS baik pada masyarakat umum, rentan, kelompok beresiko tinggi tertular HIV/AIDS dan meningkatkan kualitas hidup orang yang telah terinfeksi HIV
- b. Menyebarluaskan infomasi dan menciptakan suasana kondusif dengan menitikberatkan pencegahan pada perilaku beresiko tinggi tertular HIV
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan berupa layanan Konseling Tes Sukarela (KTS), Pengobatan, Perawatan dan dukungan kepada orang yang telah terinfeksi HIV yang terintregasi dengan upaya pencegahan

- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat termasuk orang yang telah terinfeksi HIV dan kelompok populasi kunci dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS
- e. Menciptakan dan mengembangkan kemitraan antara instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah, LSM, Lembaga Donor, Sektor Swasta/Dunia Usaha, Organisasi Profesi, Orgabisasi Kepemudaan, Organisasi keagamaan, Orgabisasi Masyarakat peduli HIV dan AIDS dan perguruan tinggi secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan respon terhadap penularan/penyebaran HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan (WY) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) menyatakan bahwa :

“Bahwa aturan-aturan mengenai Pencegahan dan penanggulangan tersebut sudah ada dijelaskan pada Peraturan Walikota nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru”

Dari hasil wawancara penulis dengan ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka sudah mengetahui mengenai peraturan-peraturan tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, tetapi mereka tidak tahu persis mengenai point-point yang telah tertera di Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang terdapat pada bagian 2 pasal 3 tentang tujuan yaitu :

- a. Meningkatkan upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS pada semua masyarakat termasuk pada kelompok beresiko tinggi, rentan dan masyarakat umum
- b. Menyediakan dan meningkatkan pelayanan perawatan, dukungan dan pengobatan yang bermutu, terjangkau, bersahabat dan berkesinambungan bagi populasi kunci orang yang telah terinfeksi HIV yang terintregasi dengan upaya pencegahan
- c. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan
- d. Terciptanya pengembangan kemitraan dinatara pihak terkait secara terpadu dan berkelanjutan guna meningkatkan pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS.

Berdasarkan hasil observasi penulis mak penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai peraturan yang terkait belum diketahui secara menyeluruh oleh ODHA

(Orang Dengan HIV/AIDS) sehingga mengakibatkan jumlah angka kasus HIV/AIDS mengalami kenaikan yang sangat drastis di Kota Pekanbaru. Penyebab dari mereka kurang mengetahui mengenai peraturan tentang pencegahan dan penanggulangan dikarenakan kurangnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan (SM) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) menyatakan bahwa :

“Mengenai aturan-aturan yang terkait sudah ada dan sudah dijelaskan pada Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru”

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa aturan-aturan hukum terkait Pencegahan dan penanggulangan sudah ada di dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tetapi masyarakat kurang mengetahui point-point yang penting terkait Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan (RN) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) menyatakan bahwa :

“Untuk aturan-aturan sudah terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru”

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa aturan-aturan hukum terkait Pencegahan dan penanggulangan sudah ada di dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tetapi

masyarakat kurang mengetahui point-point yang penting terkait Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan (KS) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) di Kota Pekanbaru menyatakan bahwa :

“Untuk aturan-aturan sudah terdapat pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Di Kota Pekanbaru”

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi penulis dilapangan, maka penulis dapat menganalisis bahwa aturan-aturan hukum terkait Pencegahan dan penanggulangan sudah ada di dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tetapi masyarakat kurang mengetahui point-point yang penting terkait Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Netty Indrawati selaku masyarakat penulis menyatakan bahwa :

“Mengenai Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Ibuk tersebut tidak mengetahui aturan-aturan hukum yang terkait”

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat penulis dapat menyimpulkan bahwasanya mereka tidak mengetahui tentang aturan hukum yang terkait Peraturan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sehingga masyarakat yang masih tabu akan hal HIV/AIDS tidak mengetahui secara detail bagaimana tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang mengakibatkan pencegahan dan penularan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru menjadi angka tertinggi, dan stigma masyarakat mengenai HIV/AIDS tidak dapat dirubah

karena masyarakat menganggap penyakit HIV/AIDS ini adalah penyakit yang tidak bisa diterima dilingkungan masyarakat sekitar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumarni Selaku masyarakat penulis menyatakan bahwa :

“Untuk aturan hukum saya tidak mengetahui mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru”

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat penulis dapat menyimpulkan masyarakat masih kurang tahu mengenai aturan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Selain itu masyarakat juga masih belum mempunyai informasi yang luas mengenai bentuk dari pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sehingga sangat dibutuhkannya peran dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) di lingkungan masyarakat yang masih tabu akan hal itu.

2. Aparatur Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) berperan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Peranan mempunyai tugas penting dalam menangani Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS, guna untuk mencegah atau mengurangi berbagai penyimpangan dan kesalahan dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Di dalam peranan tersebut memerlukan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang baik dan efektif dari pekerja.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hassan Supriyanto, SP Selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menyatakan bahwa :

“Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sudah mempunyai SOP Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang salah satu tugas dan fungsinya adalah

melakukan penyebarluasan informasi dan menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu fungsi KPA dalam menyebarluaskan informasi dan menghimpun data belum terlaksana penuh di lingkungan masyarakat karena saat ini pun kinerja KPA yang kurang berjalan efektif membuat penyebarluasan informasi menjadi terhambat, perlu ditingkatkan kembali kinerja KPA saat ini dengan melihat jumlah angka kasus HIV/AIDS yang semakin meningkat, dengan begitu salah satu fungsi dari KPA untuk saat ini tidak terlaksana secara efektif.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hudzalifah, Amd Selaku Anggota KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) mengatakan bahwa :

“SOP KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) ada, salah satu SOP kita ya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam hal monitoring saat ini tidak berjalan dikarenakan kinerja yang tidak efektif dari KPA, serta juga melemahnya SDM (Sumber Daya Manusia) yang membuat KPA tidak bisa melaksanakan salah satu tugasnya, apabila salah satu tugas itu tidak berjalan dengan baik dan semestinya maka mengenai Pencegahan dan Penanggulangan di lingkungan masyarakat sulit untuk tersampaikan di lingkungan masyarakat, maka dari itu KPA seharusnya lebih berupaya dan gencar dalam meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yeni Safitri, SKM Selaku Penanggung Jawab HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Untuk SOP dari KPA ya tau salah satunya kan dengan menyebarluaskan informasi, mengkoordinasikan instansi-instansi yang terkait untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan sudah tau mengenai SOP dari KPA tetapi menurut penulis dalam penyebarluasan informasi yang diberikan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tidak mudah untuk diterima masyarakat dikarenakan informasi yang diberikan melalui media digital, media sosial informasi tersebut tidak gencar dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat belakangan tahun ini, tidak semua masyarakat akan mengerti bagaimana menerima informasi melalui media massa, media digital seperti spanduk dan baliho serta brosur-brosur, dan juga media sosial karena informasi yang diberikan hanya melalui itu saja tidak cukup untuk membahas apa itu HIV/AIDS, bagaimana pencegahan dan penanggulangannya, apa dampak dan akibat dari HIV/AIDS apabila tertular, maka dari itu sangat dibutuhkan peran KPA dalam penyampaian informasi dengan turun langsung di lingkungan masyarakat untuk bersosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Hedra, Spd Selaku Koordinator Program LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan Utama Group mengatakan bahwa :

“Mengenai SOP nya kita sudah tahu, yaitu menyebarluaskan informasi, terus mengkoordinasikan dengan instansi-instansi terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu SOP KPA dalam mengkoordinasikan instansi-instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanggulaman HIV/AIDS sudah terjalin cukup baik, namun

dikalangan masyarakat umum mereka belum sepenuhnya melakukan kegiatan dalam memberikan informasi Pencegahan dan Penanggulangan sehingga masih banyak masyarakat belum terlalu paham mengenai HIV/AIDS, seharusnya KPA merangkul masyarakat untuk memberikan informasi mengenai HIV/AIDS ini agar kasus HIV/AIDS tidak semakin tinggi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak (WY) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Mengenai SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kita hanya mengetahui mereka harus menyebarluaskan informasi mengenai HIV/AIDS kepada masyarakat, Kelompok beresiko tinggi, kelompok rentan”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mereka mengetahui salah satu SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) adalah dengan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, kelompok rentan dan juga kelompok beresiko tinggi yang dimana informasi yang disampaikan belum sepenuhnya menyebar luas kepada masyarakat yang harus diberikan pemahaman mengenai HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk (SW) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Mengenai SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kita tidak mengetahui dengan hal itu”

Berdasarkan hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak tahunya ODHA mengenai SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, yang dimana seharusnya para ODHA mengetahui fungsi dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam menjalankan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk (RN) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Mengetahui SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kita tidak mengetahui dengan hal itu”

Berdasarkan hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak tahunya ODHA mengenai SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, yang dimana seharusnya para ODHA mengetahui fungsi dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam menjalankan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk (KS) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Mengetahui SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kita tidak mengetahui dengan hal itu”

Berdasarkan hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak tahunya ODHA mengenai SOP dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, yang dimana seharusnya para ODHA mengetahui fungsi dan tugas Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam menjalankan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Netty Indrawati Selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Tidak tahu mengenai SOP KPA dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat tidak mengetahui tentang SOP KPA dalam Pencegahan dan

Penanggulangan HIV/AIDS, dengan begitu berarti KPA harus lebih aktif lagi memberikan informasi terkait HIV/AIDS agar masyarakat mengetahui apa tugas dan fungsi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumarni Selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Tidak mengetahui SOP KPA dalam pencegahan dan penanggulangan terkait HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak tahunya masyarakat mengenai SOP KPA dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

B. Individu Masyarakat Sebagai Organisasi

Organisasi adalah suatu persatuan individu-individu yang saling bekerja sama untuk mengembangkan visi dan misi agar mencapai suatu tujuan yang sama. Suatu organisasi akan dikatakan baik apabila keberadaan organisasi tersebut mempunyai dampak positif dilingkungan masyarakat atau dilingkungan sekitarnya. Organisasi mempunyai kemampuan membangun komunikasi yang baik, efektif dan efisien sehingga mampu berfikir, bersifat dan bertindak tepat dalam menjalin komunikasi dan suatu organisasi juga mampu memprediksi perilaku manusia dalam tindakan.

1. Kemampuan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam memberikan pelayanan yang baik

Dengan memberikan suatu pelayanan yang baik untuk masyarakat maka akan memberikan kemudahan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS, sehingga masyarakat yang belum sadar akan HIV/AIDS terutama pada orang yang

beresiko tinggi tertular HIV/AIDS mempunyai kesadaran dengan diberikannya pelayanan yang baik dan cukup kepada mereka, sehingga masyarakat pun tidak mempunyai stigma yang buruk terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Supriyanto, SP Selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mengatakan bahwa :

“Menegenai pelayanan kita sudah memberikan pelayanan yang baik dan cukup kepada orang yang terkena HIV dan AIDS dengan menyebarluaskan informasi melalui spanduk, media sosial, dan disaat rapat bersama anggota-anggota organisasi yang bersangkutan serta ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) dan mendirikan stand-stand di berbagai tempat seperti di kantor-kantor, cfd, dan mall”

Dari hasil wawancara diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sudah cukup berupaya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang terkena virus HIV dengan memberikan dan menyebarluaskan informasi melalui media sosial, spanduk, dan juga sosialisasi saat diadakannya rapat bersama.

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan menyebarluaskan informasi hanya melalui beberapa media saja belum maksimal dilakukan karena, belum semua orang bisa mengakses informasi melalui media sosial, masih banyak juga yang akan tidak mengerti bagaimana menggunakan media sosial untuk melihat cara Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, maka dari itu sangat lah diperlukam peran Komisi Penanggulangan AIDS dalam memberikan informasi secara rata dan menyeluruh kepada masyarakat baik itu kepada masyarakat umum, orang yang beresiko tinggi dan orang yang rentan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hudzalifah, A.Md Selaku Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mengatakan bahwa :

“Untuk pelayanan saat ini diberikan melalui media digital, diadakannya rapat bersama anggota, organisasi dan instansi yang terkait serta teman-teman yang terkena virus HIV/AIDS”

Dari hasil wawancara di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) hanya memberikan atau menyebarluaskan informasinya melalui media sosial, spanduk dan rapat bersama organisasi-organisasi yang terkait. Dan memberikan bentuk motivasi-motivasi serta dukungan kepada teman-teman yang terkena virus HIV dan AIDS.

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KPA hanya memberikan informasi di media digital saja belum menyampaikan informasi yang luas diluar dari media digital, sehingga masyarakat yang masih belum tahu dan masih tabu akan hal Pencegahan dan Penanggulangan serta Penularan HIV dan AIDS akan tidak mengetahui secara detail bagaimana bentuk-bentuk dari penanggulangan itu yang dapat mengakibatkan angka jumlah kasus HIV/AIDS semakin meningkat dan membuat kurang sadarnya masyarakat akan HIV/AIDS yang mematikan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yeni Safitri, SKM Selaku Penanggung jawab HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Menegenai pelayanan-pelayanan yang diberikan KPA hanya memberikan motivasi tetapi mereka tidak menyediakan fasilitas-fasilitas lainnya seperti pengobatan, konseling, karena itu Dinas Kesehatan yang bekerjasama dengan beberapa pihak seperti Rumah sakit dan juga Puskesmas”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KPA sudah memberikan pelayanan dengan cara memotivasi dan menyebarkan informasi dengan seksama tetapi belum maksimal karena bentuk dari penyebaran informasi yang hanya melalui media massa, dan untuk pengobatan serta perawatan Dinas Kesehatan sudah memberikan pelayanan yang cukup untuk ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dengan menyediakan fasilitas kesehatan gratis kepada ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS), kelompok beresiko tinggi dan masyarakat umum yang ingin melakukan Konseling secara gratis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Hedra, Spd selaku Koordinator Program Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Utama Group mengatakan bahwa :

“Saat ini Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum memberikan pelayanan yang cukup kepada ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) karena mereka hanya memberikan motivasi saja tidak mendampingi, tetapi mereka sudah cukup berperan dalam Penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sudah cukup berperan dalam memberikan motivasi tetapi tidak secara mendampingi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS), dengan begitu ODHA sangat membutuhkan perhatian yang lebih dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan memberikan bentuk pelayanan yang lainnya bukan hanya sekedar memberikan Informasi serta motivasi saja. Untuk LSM itu sendiri mereka sudah melakukan upaya dengan mendampingi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dan memberikan motivasi serta pelayanan dengan merekomendasikan para ODHA untuk mengambil obat gratis yang

disediakan pemerintah di Puskesmas/Rumah sakit terdekat, serta mereka juga mendorong masyarakat untuk melakukan Tes Konseling secara gratis dan juga memberikan arahan kepada ODHA agar tidak menyebarkan HIV/AIDS melalui hubungan seksual dengan cara memberikan kondom secara rutin.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak WY Selaku ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) mengatakan bahwa :

“Dalam memberikan pelayanan KPA tidak berperan dengan baik, bahkan 2 tahun belakangan ini sama sekali KPA tidak berperan menjalankan tugasnya dalam Penanggulangan HIV dan AIDS, di lima tahun lalu mereka masih berjalan dalam memberikan bentuk pelayanan dan memberikan dukungan serta motivasi, tetapi akhir-akhir ini sudah tidak ada”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini KPA tidak berjalan semestinya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyebarluaskan informasi dan memberikan motivasi kepada ODHA yang masih membutuhkan bimbingan serta motivasi-motivasi yang banyak agar bisa semangat dalam melewati virus yang di alaminya, dikarenakan SDM (Sumber Daya Manusia) dari KPA itu sendiri pun sangat minim untuk dilakukannya atau dijalankannya kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS. Yang mengakibatkan beberapa tahun belakangan ini jumlah angka kasus HIV dan AIDS naik sangat tinggi di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru urutan nomor pertama. Dengan begini sangat dibutuhkannya kinerja yang cukup dari KPA itu sendiri agar Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS berjalan dengan sebaik-baiknya supaya tidak ada lagi virus yang menyebar secara luas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk SM Selaku ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) mengatakan bahwa :

“Untuk mendampingi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) KPA tidak mendampingi sama sekali proses yang dilewati, kami hanya didampingi oleh LSM yang bersangkutan, untuk bentuk motivasi pun sekarang sudah tidak didapatkan lagi dari KPA”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa memang KPA kurang berperan dalam melakukan tugasnya dalam penyampaian informasi secara berskala baik itu kepada ODHA, kelompok beresiko tinggi, kelompok rentan dan masyarakat umum, keterbatasan yang dialami KPA saat ini menjadi kendala bagi mereka untuk melakukan dan memberikan informasi tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS sehingga informasi tidak tersampaikan secara baik kepada masyarakat umum yang kurang memahami bentuk dari Pencegahan, Penanggulangan, Penularan, dampak dan akibat HIV/AIDS itu.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk (RN) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Dalam hal pendampingan KPA tidak melakukan pendampingan secara rutin, yang mendampingi kita selama proses masa penyembuhan lebih banyak itu LSM”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa memang dalam proses mendampingi teman-teman ODHA KPA kurang berperan, karena mereka tidak terlalu ikut andil dalam proses pemulihan dari teman-teman ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS), sehingga para teman-teman ODHA merasa tidak mendapatkan perhatian khusus.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk (KS) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Saat ini pelayanan yang diberikan tidak terlihat untuk kami para penyandang, baik itu penyampaian informasi dalam memberikan arahan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan serta motivasi-motivasi tidak didapatkan lagi dalam waktu beberapa tahun belakangan ini”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini dalam memberikan pelayanan seperti memberikan informasi Pencegahan dan Penanggulangan serta motivasi-motivasi yang seharusnya diberikan oleh KPA kepada teman-teman ODHA sudah tidak diterima lagi, peran KPA sangat diperlukan dalam hal penyampaian informasi serta motivasi dalam membangkitkan semangat teman-teman ODHA

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Netty Indrawati Selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Untuk pelayanan itu sendiri di sekitaran masyarakat KPA belum berperan, karena informasi tidak tersosialisasikan dilingkungan masyarakat umum, kalau hanya memakai media massa seperti pemasangan spanduk dan diberikan brosur saja belum tentu masyarakat memahami bentuk dari Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KPA belum berperan penuh di lingkungan masyarakat umum karena penyampaian informasi yang tidak tersalurkan secara detail tentang bagaimana bentuk dari pencegahan dan penanggulangan serta penularan HIV dan AIDS, KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) memberikan informasi hanya melalui media massa saja yang tidak dapat dimengerti oleh masyarakat, dan membuat masyarakat tidak sadar akan bahaya dari penyakit HIV/AIDS sehingga membuat jumlah angka kasus kematian meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumarni Selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini KPA belum berperan kepada masyarakat, dikarenakan masih minimnya informasi yang tersampaikan mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS serta dampak dari penularan virus itu yang belum tersampaikan secara menyeluruh”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa saat ini KPA sangat belum berperan dalam menyampaikan informasi secara mendetail dan menyeluruh ke masyarakat umum yang membuat kurangnya pengetahuan informasi bagaimana bentuk dari pencegahan dan penanggulangan serta dampak yang akan terjadi apabila virus itu menyebar di tubuh seseorang yang membuat seseorang itu akan kehilangan nafsu makan, bekurangnya berat badan dan tidak semangat dalam beraktivitas, maka dari itu motivasi dan penyampaian informasi adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar virus HIV/AIDS tidak tersebar luas dan menurunkan jumlah angka HV/AIDS di Kota Pekanbaru.

2. Menyediakan dan memberikan pelayanan untuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Dengan menyediakan dan memberikan pelayanan kepada ODHA untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS agar tidak semakin tinggi jumlah kasus HIV/AIDS maka pihak yang bertanggung jawab harus menyediakan pelayanan yang tepat kepada masyarakat umum, kelompok beresiko tinggi tertular HIV/AIDS dan kelompok rentan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Supriyanto, SP Selaku Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mengatakan bahwa :

“Kita sudah memberikan pelayanan dengan menyebarluaskan informasi dan mendorong masyarakat untuk melakukan Tes Konseling secara gratis yang sudah kita sediakan dengan bekerja sama di beberapa rumah sakit/puskesmas, tetapi memang beberapa tahun belakangan ini kita tidak berperan banyak dalam melaksanakan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS, karena keterbatasan dana dan Sumber Daya Manusia (SDM) itu sendiri”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sudah menyediakan dan memberikan pelayanan yang cukup kepada ODHA dan masyarakat umum, tetapi KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) masih belum efektif dalam menyampaikan informasi sehingga masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui mengenai adanya Tes Konseling gratis yang di sediakan oleh Pemerintah di beberapa rumah sakit dan juga puskesmas sehingga kesadaran masyarakat untuk melakukan tes tersebut masih kurang, hal itu terjadi akibat dari penyampaian informasi yang tidak tersebar secara merata dilingkungan sekitar dan di beberapa tahun belakangan ini KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) tidak berperan dalam memberikan informasi mengenai bagaimana cara Pencegahan dan Penanggulangan serta dampak dan akibat dari HIV/AIDS, sehingga membuat masyarakat kurang paham akan penularan HIV/AIDS tersebut, apabila informasi yang diberikan kurang dan tidak berjalan dengan lancar maka angka jumlah kasus HIV/AIDS sulit untuk berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hudzalifah, Amd Selaku Anggota Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mengatakan bahwa:

“Kemarin kita sudah mengadakan rapat koordinasi dengan LSM, Dinas-Dinas terkait, lalu dengan penyebaran informasi melalui media digital seperti spanduk, kemarin juga sempat mengadakan JAMORE dengan kader-kader, itu bentuk dari upaya pencegahan HIV/AIDS yang telah kita lakukan”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sudah memberikan pelayanan dengan cara penyampaian informasi melalui beberapa rapat dan pertemuan dengan organisasi-organisasi serta badan/unit yang bersangkutan, tetapi penyebarluasan informasi mengenai Pencegahan, Penanggulangan, Penularan serta dampak dan akibatnya tidak tersampaikan ke masyarakat umum sehingga membuat masyarakat masih mempunyai stigma yang buruk terhadap ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dan apabila informasi tersebut hanya disebarluaskan bersama instansi-instansi terkait saja maka dari itu masyarakat umum yang kurang paham akan HIV/AIDS akan tidak mengerti tentang HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yeni Safitri, SKM selaku Penanggung Jawab HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Kalau untuk pelayanan sendiri kita sudah menyediakan layanan-layanan dengan bekerja sama di 21 puskesmas untuk melakukan tes HIV/AIDS, kita juga memberikan 14 layanan pengobatan kepada ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) tetapi kalau untuk KPA sendiri mereka hanya memberikan bentuk pelayanan dari dukungan dan motivasi saja”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota sudah memberikan beberapa bentuk layanan-layanan kesehatan kepada ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) sementara KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) yang mempunyai tanggung jawab serta tugas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat masih kurang efektif dilaksanakan karena KPA itu yang harus mendekati diri kepada lingkungan masyarakat untuk menyampaikan hal mengenai pencegahan, penanggulangan serta cara

penularan HIV dan AIDS agar informasi yang diberikan dapat dipahami oleh semua masyarakat bukan saja hanya kepada ODHA, kelompok resiko tinggi tertular HIV, dan kelompok rentan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Hedra, Spd Selaku Koordinator Program LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan Utama Group mengatakan bahwa :

“Mengenai pelayanan KPA sebenarnya sudah cukup berperan, tetapi kepada LSM mereka kurang cukup ikut andil karena kita menyediakan fasilitas sendiri, bentuk pelayanan yang diberikan mereka kepada ODHA hanya memberikan motivasi dan dorongan saja”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan Utama Group menyediakan dan memberikan fasilitas sendiri untuk mendampingi ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dengan menyediakan kondom di beberapa titik yang menjadi alokasi yang mengkhawatirkan terjadinya penularan HIV/AIDS, para ODHA hanya mendapatkan arahan dan motivasi dari KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) serta dorongan bagaimana untuk tetap semangat dalam menjalani masa pengobatan, antara LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) kurang menjalin komunikasi yang baik dan bekerja sama untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak WY Selaku ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) mengatakan bahwa :

“Kalau untuk pelayanan belum cukup berperan kepada kami, karena penyampaian informasi mereka pun tidak selalu berjalan secara lancar, seharusnya mereka bisa berperan tetapi peran mereka tadi belum optimal dilakukan, seharusnya mereka mengkoordinir ke instansi-instansi yang terkait

untuk melakukan kegiatan kepada kita selaku masyarakat mengenai Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa memang untuk penyampaian informasi yang dilakukan KPA sangat kurang terlaksana, 5 tahun belakangan yang lalu mereka masih memberikan informasi mengenai cara Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS tetapi hanya dilakukan di skala kecil namun 2 tahun belakangan ini KPA sudah tidak sama sekali memberikan pelayanan informasi dan memberikan motivasi mengenai pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik itu dilingkungan masyarakat umum, ODHA, kelompok beresiko tinggi tertular HIV ataupun di kelompok rentan, yang dimana seharusnya peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam memotivasi serta memberikan arahan dan semangat kepada teman-teman ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) itu sangat penting untuk dilaksanakan tetapi dikarenakan beberapa faktor salah satunya faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak memadai membuat KPA terhambat dalam melakukan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk SM Selaku ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) mengatakan bahwa :

“Untuk penyampaian informasi pernah ada dilakukan di satu puseksmas di sail ada 50 orang ODHA diberikan penyuluhan mengenai Pencegahan, Penanggulangan dan cara Penulrannya, namun itu dilakukan tidak secara rutin hanya beberapa kali saja”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penyampain informasi yang minim membuat para ODHA kurang mengerti bagaimana bentuk dari Penanggulangan, Pencegahan serta Penularan dari

HIV/AIDS, dan untuk melakukan sosialisasi KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) tidak rutin memberikan edukasi dan informasi kepada ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dengan begitu informasi yang seharusnya didapatkan secara jelas dan menyeluruh jadi sangat minim karena KPA sendiri kurang berperan dalam penyampaian informasinya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Netty Indrawati Selaku masyarakat menyatakan bahwa :

“Kalau dalam memberikan pelayanan berupa penyampaian informasi mengenai HIV/AIDS itu sangat jarang didapatkan ya di lingkungan masyarakat umum, kita paling mendapatkan dan mengetahui informasi itu melihat sekilas dari spanduk dan baliho saja tetapi dengan cara seperti itu untuk masyarakat umum susah dipahami bagaimana tepatnya”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) hanya memberikan informasi melalui media digital seperti spanduk itu kurang efektif dilakukan, dikarenakan pemahaman yang kurang tersampaikan kepada masyarakat umum, dengan hanya memasang baliho atau spanduk saja masyarakat tidak akan paham bagaimana bentuk dari penanggulangan, pencegahan, penularan serta apa itu penyakit HIV/AIDS dan dengan begitu sulit untuk masyarakat meningkatkan kesadarannya bahaya dari HIV/AIDS apabila informasi mengenai HIV/AIDS sangat minim diterima masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumarni Sealku masyarakat mengatakan bahwa:

“Dari KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) sudah berupaya namun masih belum maksimal ya dikarenakan di lingkungan masyarakat umum masih banyak yang belum tahu perihal informasi yang jelas dan edukasi terkait HIV/AIDS ini,

mungkin jika diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat umum maka kita akan lebih tau perihal informasi dan edukasi terkait HIV/AIDS ini”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dikalangan masyarakat umum pun informasi dan edukasi mengenai Penanggulangan, Pencegahan serta Penularan HIV/AIDS belum tersampaikan secara maksimal dikarenakan kurangnya sosialisasi dari KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) yang membuat banyak masyarakat tidak mengetahui point-point yang seharusnya informasi tersebut sudah mereka pahami di diri masing-masing.

C. Struktur Sosial

Struktur Sosial merupakan sebagai pola perilaku berulang individu dan kelompok yang menciptakan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat, sebagai unsur-unsur dalam masyarakat yang tersusun secara teratur sehingga membentuk suatu kesatuan yang sistematis, struktur sosial juga sebagai alat analisis yang dibentuk membantu pemahaman tentang perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Struktur sosial juga merupakan sebuah hubungan antar individu dengan orang lain (masyarakat) untuk membentuk norma, nilai, atau peraturan yang ada di dalam suatu masyarakat demi kepentingan masyarakat.

Struktur sosial juga dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik antara posisi sosial serta perannya yang dimainkan oleh individu atau kelompok dalam struktur tersebut, struktur sosial juga memiliki keterkaitan dengan perilaku dasar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang menjalankan fungsinya masing-masing, struktur sosial juga membuat relasi-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Struktur sosial juga

dipahami sebagai suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentukan masyarakat. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain dan fungsional. Salah satu kelebihan adanya struktur sosial dalam sebuah lingkungan adalah mampu membuat suatu daerah menjadi lebih terkondisikan. Bentuk dari struktur sosial adalah stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Stratifikasi sosial sendiri merupakan bentuk dari unsur sosial dengan melakukan sebuah interaksi dengan orang lain yang ada di dalam masyarakat dalam waktu lama.

1. Meningkatkan kepedulian dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Supriyanto, SP Selaku Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) mengatakan bahwa :

“Untuk meningkatkan kepedulian kepada masyarakat umum dan ODHA kita telah berupaya dengan melakukan komunikasi di lingkungan masyarakat dan mengadakan rapat dengan berbagai koordinasi kepada instansi-instansi terkait untuk melakukan Pencegahan, Penanggulangan dan Penularan HIV/AIDS serta dampak dan akibat yang akan terjadi apabila seseorang terkena HIV/AIDS, tetapi jujur ditahun ini kami melemah karena keterbatasan anggaran, kantor yang tidak menetap dan kurangnya tenaga kerja”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan kepedulian KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) telah berupaya dalam memberikan informasi serta dorongan kepada masyarakat umum dan juga ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) tetapi saat ini mereka terhambat untuk bertindak dalam melakukan Pencegahan, Penanggulangan, dan Penularan HIV/AIDS dikarenakan anggaran untuk melakukan kegiatan program serta menyebarkan informasi tidak tercukupi, dan tenaga kerja yang tidak memadai untuk melakukan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS, serta kantor yang

belum terfasilitasi secara baik, dengan begini kinerja KPA saat ini sangat tidak berjalan sesuai dengan perannya dalam memberikan informasi dan edukasi kepada lingkungan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hudzalifah, Amd Selaku Aggota KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) mengatakan bahwa :

“Bentuk dari kepedulian sudah dilaksanakan dengan cara memotivasi teman-teman ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS), lalu memberikan edukasi dan informasi tetapi memang untuk saat ini informasi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan tidak berjalan, karena keterbatasan anggaran yang membuat program kita mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS jadi terhambat dilaksanakan”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak terlaksanakannya kegiatan pencegahan dan penanggulangan dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai HIV dan AIDS dikarenakan anggaran yang terbatas serta kinerja KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) yang kurang efektif untuk dilaksanakannya program, sebaiknya motivasi yang dilakukan dan diberikan kepada orang yang telah terinfeksi virus HIV/AIDS harus terus selalu dijalankan agar mereka mempunyai semangat untuk tetap hidup, apabila motivasi tidak dijalankan secara rutin maka ODHA tidak merasa didampingi oleh pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Yeni Safitri, SKM Selaku Penanggung Jawab HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Dalam meningkatkan kepedulian ini kita sudah berjalan yang dilakukan oleh promkes ya tentang apa itu HIV/AIDS, bagaimana bentuk penularan dan pencegahannya, tetapi itu tergantung kepada individu masing-masing lagi apakah mereka bisa menghilangkan stigma nya terhadap ODHA atau tidak, lebih mudah berkomunikasi ketika mereka tidak menjauhi ODHA, untuk KPA sendiri mereka

sudah berperan dengan memberikan informasi dan edukasi serta memotivasi masyarakat dalam mengajak mereka untuk tes konseling, lalu dengan memasang informasi di media massa tetapi kalau hanya itu saja kurang untuk masyarakat paham akan bentuk penularan tadi, mereka harus turun langsung di lingkungan masyarakat agar informasi yang diberikan mudah untuk dipahami”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi yang diberikan KPA hanya melalui media massa saja itu kurang efektif untuk dilakukan karena masyarakat pasti tidak tau lebih mengenai apa itu HIV/AIDS, bagaimana bentuk penularannya, bagaimana pencegahannya, lebih baik KPA turun langsung dan merangkul masyarakat agar informasi yang diberikan KPA mudah dipahami dan dimengerti, dengan begitu penyampaian informasi yang diberikan tidak simpang siur dan keliru dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) harus lebih merangkul masyarakat untuk mengajak masyarakat melakukan Tes Konseling Sukarela agar HIV/AIDS tidak semakin meningkat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Hedra, Spd Selaku Koordinator Program LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan Utama Group mengatakan bahwa :

“Sudah, dengan mereka mengajak kami ikut rapat koordinasi bersama instansi-instansi terkait, mereka juga sudah memberikan kepedulian dengan memberikan motivasi ya kepedaa ODHA, lalu tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ODHA agar tidak lupa mengkonsumsi obat, dan tetap semangat dalam menjalani masa pengobatannya”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) sudah meningkatkan kepedulian dengan memberikan motivasi dengan teman-teman ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dan memberikan informasi-informasi kepada masyarakat umum, tetapi

penulis melihat disini masih banyak masyarakat yang kurang paham akan dampak dari HIV dan AIDS, apa itu HIV/AIDS karena KPA tidak memberikan informasi secara akurat hanya dengan memberikan brosur, spanduk, dan melalui media sosial saja yang tidak banyak dimengerti oleh masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak (WY) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Bentuk kepedulian yang telah dirasakan oleh kita sebagai ODHA sudah ada seperti memberikan arahan serta motivasi dalam proses pengobatan HIV/AIDS, tetapi memang untuk sekarang kita tidak lagi mendapatkan peran dari KPA itu sendiri”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memberikan arahan sudah didapatkan teman-teman ODHA, tetapi saat ini memang teman-teman ODHA sendiri merasakan kurang berjalannya peran KPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi, dukungan serta dampingan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk (SM) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Bentuk kepedulian yang telah dirasakan oleh kita sebagai ODHA sudah ada seperti memberikan arahan serta motivasi dalam proses pengobatan HIV/AIDS, tetapi memang untuk sekarang kita tidak lagi mendapatkan peran dari KPA itu sendiri”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk memberikan arahan sudah didapatkan teman-teman ODHA, tetapi saat ini memang teman-teman ODHA sendiri merasakan kurang berjalannya peran KPA dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan informasi, dukungan serta dampingan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Netty Indrawati Selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau untuk kepedulian dari KPA kepada masyarakat nya sendiri yang baru dirasakan masih dalam bentuk informasi melalui media sosial, iklan di tv, spanduk, brosur-brosur yang dibagikan di cfd dan event-event yang dilaksanakan di mall, kalau hanya diberikan informasi yang seperti itu saja kita masyarakat umum masih kurang paham mengenai bentuk dari Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, sebaiknya diadakan sosialisasi di tengah-tengah lingkungan masyarakat”

Dari hasil wawancara penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam meningkatkan kepedulian sudah terlaksana tetapi memang tidak rutin dilaksanakan dan masih jarang dilakukan dengan begitu masyarakat tidak akan mudah cepat paham mengenai HIV/AIDS, kinerja KPA pun beberapa tahun belakangan ini sudah melemah dengan tidak terlaksanakannya kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan, serta Penularan HIV/AIDS, informasi-informasi yang tersebar pun hampir sudah tidak ada lagi baik itu di media sosial, media digital seperti spanduk dan baliho, dengan diberikannya brosur serta pemasangan baliho pun masyarakat banyak yang acuh tak acuh akan informasi yang diberikan karena tidak diberikan pemahaman, maka dari itu KPA harus gencar untuk memberikan informasi yang mudah dipahami dan dimengerti kepada masyarakat umum.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Sumarni Selaku masyarakat menyatakan bahwa:

“Kalau untuk kepedulian masih kurang ya, karena penyampaian informasi yang mereka berikan pun masih jarang dan belum terlalu dapat dipahami, karena masih banyak juga yang gatau bagaimana dampak, akibat, serta cara penularannya bagaimana, karena informasi yang didapatkan hanya sedikit mereka pun jarang untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai HIV/AIDS untuk sekarang ini”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk sekarang dalam meningkatkan kepedulian KPA sudah tidak bereperan lagi karena penyampaian informasi yang kurang diberikan untuk saat ini dan bentuk informasi yang diberikan sekarang pun tidak jelas melalui apa, sehingga membuat masyarakat bingung dan menjadi tidak paham serta minim akan informasi bagaimana cara penularan HIV/AIDS, bagaimana reaksi yang akan dialami tubuh jika terkena virus HIV/AIDS, dan bagaimana bentuk dari pencegahannya, maka dari itu KPA harus turun langsung untuk memberikan informasi mengenai HIV dan AIDS.

2. Melakukan Komunikasi yang baik, pemberian saran dan pendapat

Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang kelompok, organisasi dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan orang lain. Komunikasi melibatkan dua orang atau lebih manusia, sebab ketika berkomunikasi terjadi proses pengiriman dan penerimaan pesan dari komunikasi kepada komunikan. Komunikasi juga diartikan sebagai proses upaya membangun pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, agar menjadi kesamaan pemahaman mengenai suatu hal. Komunikasi juga salah satu sarana untuk terkoneksi dengan orang-orang disekeliling kita, dengan adanya pemberian saran dan pendapat untuk memberikan solusi yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hasan Supriyanto, SP Selaku Sekretaris KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) mengatakan bahwa :

“Kita sudah menjalin komunikasi yang baik antara instansi-instansi yang terkait dengan mengadakan rapat koordinasi bersama LSM, Dinas yang bersangkutan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, kami prihatin dengan kasus HIV/AIDS yang tinggi untuk saat ini di pekanbaru, tapi kami juga keterbatasan dana dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) sudah menjalin komunikasi yang baik antara instansi-intansi dengan mengadakan rapat-rapat koordinasi bersama LSM, Dinas yang bersangkutan tetapi untuk saat ini KPA tidak berperan dalam menjalin komunikasi kepada masyarakat umum, ODHA dalam menyampaikan informasi dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan serta Penularannya. Dengan jumlah kasus angka yang tinggi di Kota Pekanbaru maka masyarakat dan ODHA sangat membutuhkan edukasi yang banyak dan penyampaian yang baik agar mudah diterima dan dipahami oleh semua kalangan baik itu masyarakat umum, kelompok resiko tinggi, kelompok rentan, remaja dan teman-teman ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Hudzalifah, Amd Selaku Anggota KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) mengatakan bahwa :

“Cukup baik ya, kita sudah berupaya dalam memberikan dan menjalin komunikasi yang baik dengan mengadakan pertemuan bersama instansi-instansi terkait, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan Dinas-dinas yang bersangkutan, tetapi dengan masyarakat saat ini kita memang kurang berperan dalam menjalin komunikasi yang baik karena dari Kinerja kita saat ini kurang efektif”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin cukup baik kepada instansi-instansi terkait, LSM dan juga Dinas yang bersangkutan saja tetapi untuk ke masyarakat sendiri belum terjalin dan terlaksana karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang efektif,

KPA hanya memberikan komunikasi dalam bentuk media tidak dalam bentuk sosialisasi, namun untuk sekarang komunikasi dan informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat umum serta teman-teman ODHA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibuk Yeni Safitri, Spd Selaku Penanggung Jawab HIV/AIDS di Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa :

“Kalau dengan instansi-instansi terkait kita sudah menjalin komunikasi yang baik, dengan LSM, dengan KPA juga sudah, serta dengan lembaga-lembaga yang mendukung juga sudah dilaksanakan, per-triwulan kita juga mengadakan pertemuan dengan instansi-instansi terkait, kita adakan rapat koordinasi dan bergerak sesuai dengan tupoksi masing-masing, namun kalau untuk ke masyarakat nya memang itu KPA harus gencar dalam menyebarluaskan informasi”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk berkomunikasi secara baik Dinas Kesehatan sudah menjalankan dengan segala upaya-upaya untuk pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, dampak dan juga akibatnya, serta Pencegahan dari HIV/AIDS, dan mereka juga sudah menjalin komunikasi yang baik kepada KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) tetapi KPA memang belakangan ini tidak terlalu aktif dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat umum dikarenakan beberapa alasan yang membuat KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) tidak berperan sesuai tugasnya sehingga membuat informasi yang seharusnya di sosialisasikan dan diberikan menjadi terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Hedra, Spd Selaku Koordinator Program LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Yayasan Utama Group mengatakan bahwa :

“Kalau untuk menjalin komunikasi ya sudah dilakukan cukup baik dengan diadakannya rapat-rapat bersama pihak yang bersangkutan untuk membahas mengenai upaya-upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara instansi-instansi terkait sudah dilaksanakan dengan baik, untuk membahas bagaimana bentuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, LSM sendiri sudah menjalin komunikasi kepada ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) dengan mengingatkan mereka untuk memakai kondom disaat berhubungan, meminum obat secara rutin, dan mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan saat ini tidak baik, tetapi seharusnya yang gencar dalam menyebarkan informasi itu KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) karena itu adalah tugas dan fungsi dari KPA, kalau informasi yang diberikan tidak akurat maka akan susah untuk dipahami masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak (WY) Selaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Untuk berkomunikasi secara intens itu tidak tetapi ada, dalam memberikan saran dan pendapat mereka sudah memberikan cukup baik, tetapi memang sekarang sudah tidak ada lagi”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa antara KPA dan para ODHA tidak begitu baik dalam memnjalankan komunikasi, tetapi dalam pemberian saran serta pendapat sudah cukup baik, tetapi memang peran KPA belakangan ini tidak berjalan cukup baik dikarebakan hambatan-hambatan yang telah terjadi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk (SM) Sekaku ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) mengatakan bahwa :

“Untuk berkomunikasi secara intens itu tidak tetapi ada, dalam memberikan saran dan pendapat mereka sudah memberikan cukup baik, tetapi memang sekarang sudah tidak ada lagi”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa antara KPA dan para ODHA tidak begitu baik dalam memnjalankan komunikasi, tetapi dalam pemberian saran serta pendapat sudah cukup baik, tetapi memang peran KPA belakangan ini tidak berjalan cukup baik dikarebakan hambatan-hambatan yang telah terjadi

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Netty Indrawaty Selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Sejauh ini KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) sudah menjalin komunikasi kepada masyarakat namun belum maksimal sehingga membuat masyarakat bingung bagaimana cara Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS, seharusnya KPA bisa memberikan informasi yang cukup dan jelas agar masyarakat pun tidak minim pengetahuan mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam memberikan informasi mengenai edukasi HIV/AIDS KPA belum maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang kurang paham akan apa itu HIV/AIDS, bagaimana pencegahan serta penularannya, karena masyarakat juga sudah lama tidak mendapatkan sosialisasi dari KPA mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS itu yang membuat masyarakat menjadi minim mengenai informasi dan pengetahuan, seharusnya KPA lebih mendekatkan diri kepada masyarakat agar informasi dan edukasi tersebut dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sumarni Selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Sampai saat ini penyampaian komunikasi tentang HIV/AIDS dari pihak KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) belum berjalan dengan baik, masih kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak KPA (Komisi Penanggulangan AIDS) kepada masyarakat, sehingga kebanyakan dari kami masih tidak paham bagaimana caranya untuk dapat mencegah atau menanggulangi HIV tersebut”

Dari hasil observasi penulis maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat yang kurang mengerti mengenai apa itu HIV/AIDS, bagaimana bentuk pencegahan dan penanggulangannya, bagaimana dampak serta akibatnya apabila virus itu telah tertular, maka dapat dilihat peran KPA yang kurang dalam penyampaian informasi kepada masyarakat umum yang seharusnya gencar dilakukan oleh KPA tetapi dengan melihat kinerja KPA sekarang sudah pasti informasi yang akan di berikan kepada masyarakat masih sangat minim, apabila hanya memberikan informasi melalui media sosial dan memberikan brosur saja sudah pasti tidak akan dipahami oleh masyarakat yang masih tidak mengetahui HIV/AIDS.

D. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis dengan pihak-pihak yang berkaitan kurang berperannya Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru tersebut adalah :

1. Minimnya anggaran yang diterima Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang diberikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru sangat minim jumlahnya yang menjadi kendala dalam melakukan koordinasi yang menyebabkan upaya Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru kurang berjalan dengan baik.
3. Sarana dan Prasarana yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru masih terdapat kekurangan, dimana kantor KPA yang tidak menetap keberadaannya.

E. Hasil Analisis

Setelah dilakukan penelitian dan beberapa wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini serta observasi di lapangan, penulis dapat menyimpulkan bahwa Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum maksimal dalam upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Karena pada kenyataan yang dapat kita lihat di lapangan masih banyak masyarakat yang kurangnya informasi yang membuat masyarakat tidak begitu paham mengenai Pencegahan, Penanggulangan, serta Penularan dari HIV/AIDS.

Pertama, peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dalam Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Sementara itu Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) menyebutkan menyebarluaskan informasi

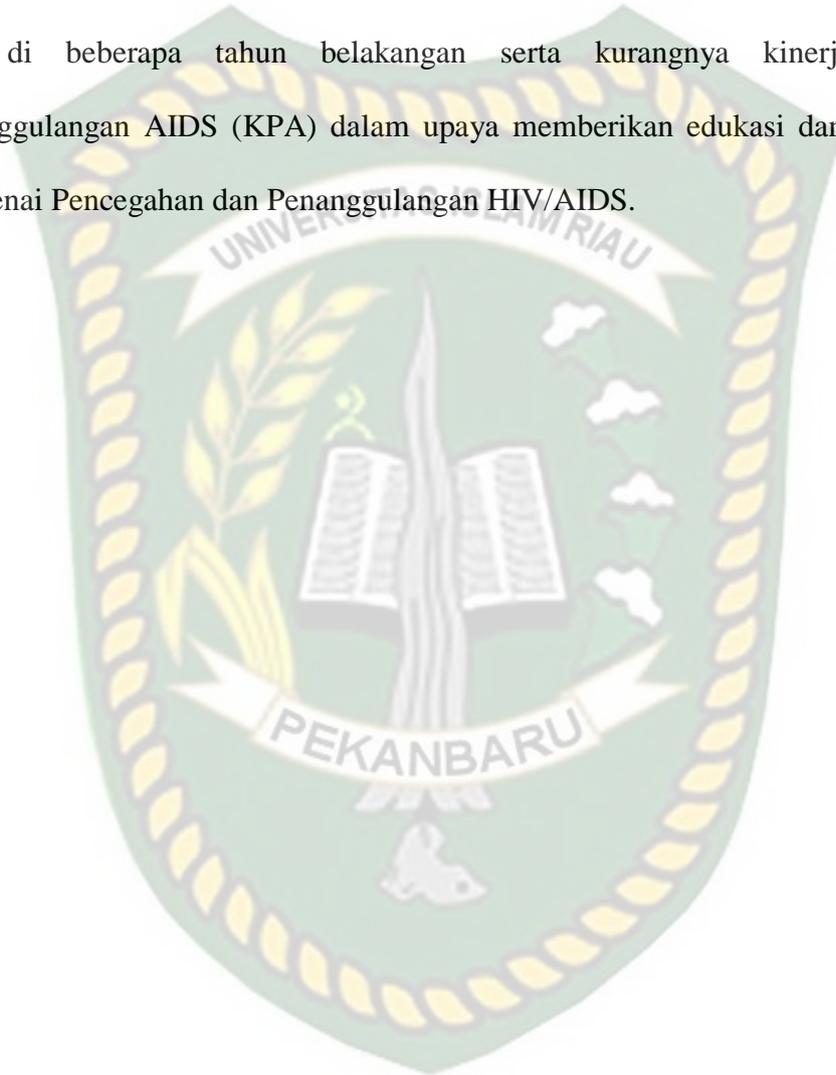
mengenai HIV/AIDS, mengkoordinasikan pihak-pihak terkait untuk Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS. Dari peraturan tersebut masih kurang berjalan dan terlaksana dalam memberikan informasi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.

Kedua, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum maksimal dalam meningkatkan dan memberikan pelayanan dalam memberikan informasi, mendampingi dan memotivasi terhadap masyarakat dan juga ODHA. Karena dari hasil wawancara yang telah dilakukan masyarakat merasa kurang dalam penyampaian informasi yang diberikan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dan untuk mendampingi serta memberikan motivasi kepada teman-teman ODHA juga sudah tidak diberikan lagi. Oleh sebab itu edukasi masyarakat menjadi sangat minim dan juga sudut pandang masyarakat terhadap ODHA yang membuat ODHA dianggap menjadi musuh mereka. Dan tidak maksimalnya kinerja serta Sumber Manusia (SDM) yang dimiliki KPA Kota Pekanbaru yang kurang efektif dalam melaksanakan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Ketiga, masih kurang meningkatkan kepedulian dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang belum efektif dilakukan. Serta kurangnya komunikasi yang terjalin antara KPA dengan masyarakat.

Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan menurut teori Prof. Dr. Soerjono Soekanto Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum dapat dikatakan berperan dengan baik karena keberhasilan atau kegagalan suatu peran tersebut dapat dipengaruhi oleh tiga indikator yaitu : norma, individu dalam

masyarakat sebagai organisasi dan struktur sosial. namun pada kenyataannya Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) belum berperan dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang dimana jumlah angka kasus HIV/AIDS naik di beberapa tahun belakangan serta kurangnya kinerja Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dalam upaya memberikan edukasi dan informasi mengenai Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah penulis lakukan maka pada bab ini penulis mengambil beberapa kesimpulan dan sebagai pelengkap akan dikemukannya saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan berkepentingan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Dalam Peran Komisi Penanggulangan HIV/AIDS (KPA) Kota Pekanbaru belum berjalan dengan maksimal, karena masih banyak masyarakat yang minim akan informasi mengenai Pencegahan, Penanggulangan dan Penularan HIV/AIDS.
2. Dalam Peran Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang mempengaruhi jalannya Peran Dinas Komisi Penanggulangan AIDA (KPA) dalam pelaksanaan Penanggulangan dan Pencegahan HIV/AIDS diantara nya :
 - a. Minimnya anggaran yang diterima Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang diberikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS.
 - b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru sangat minim jumlahnya yang menjadi kendala dalam melakukan koordinasi yang menyebabkan upaya

- c. Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru kurang berjalan dengan baik.
- d. Sarana dan Prasarana yang ada di Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru masih terdapat kekurangan, dimana kantor KPA yang tidak menetap keberadaannya.

B. Saran-Saran

1. Dengan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh KPA Kota Pekanbaru sangat dibutuhkan untuk melakukan penambahan pegawai (staff) agar meningkatkan kinerja yang lebih maksimal lagi dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS agar jumlah angka kasus HI/AIDS bisa berkurang setiap tahunnya.
2. Sebaiknya dalam menjalankan program Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), sangat perlu untuk melibatkan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), maka dengan demikian akan tercipta suatu hubungan dan kinerja yang baik antara Pemerintah Kota Pekanbaru dengan masyarakat. Disamping itu perlu juga akan membuat masyarakat merasa bertanggung jawab atas kepedulian HIV/AIDS ini agar menciptakan kondisi Kota Pekanbaru yang kondusif akan AIDS.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memberikan perhatian lebih kepada Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada KPA agar memiliki

kantor yang menetap keberadaannya agar KPA bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, Desta Cahya 2020. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Bantul
Yogyakarta : Pustaka Baru Press
- Budiarjo, Miriam 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta ; PT. Gramedia
Pustaka Umum.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*.
Yogyakarta; Gajah Mada University Press
- Effendy, Onong Uchjana, 2003. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung :
Citra Aditya Bakti.
- , Onong Uchjana, 2008. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya.
- Gie, 1974. *Administrasi Perkantoran Moderent*. Nur Cahya, Yogyakarta.
- Green. C. W. 2007. *HIV Dan TB*. Yogyakarta : Yayasan Spiritia.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. PT : Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Kountur, Ronny, 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*.
Jakarta: PPM.
- Kuper Adam, Yessica Kuper. 2000. *Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*. PT Raja
Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamim Sufian dan Adnan Indra Muchlis. 2005. *Organisasi dan Manajemen*.
Multigrafindo, Jakarta.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.

Ndraha, Taliziduhu 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*, Jakarta: Renika Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jkarta: Renika Cipta.

Ndraha, Taliziduhu. 2008. *Kybernologi Sebuah Metamorphosis*. Sirao Credentia Center, Tangerang

Sedarmayanti, 2004, *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung; Refika Aditama

Siagian, Sondang P, 1997. *Teori Pengembangan Organisasi*. Bina Aksara, Jakarta.

Sudarso, 1988. *Organisasi Dan Metode*. Karunika Universitas Terbuka, Jakarta.

Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Soekanto, Soerjono, 2001. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.

Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Tresiana, Duadji, 2017. *Kebijakan Publik Teori Dan Praktek Model-Model Pengelolaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Suluh Media.

Widodo, Joko. 2018. *Analiss Kebijakan Publik*. Malang : MNC

DOKUMEN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan Masyarakat

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Pekanbaru

Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2013 tentang Komisi Penanggulangan AIDS

JURNAL

Vol. 3 No.1 Tahun 2015 : Strategi Komunikasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Dalam Melakukan Sosialisasi HIV/AIDS di Kota Samarinda

Vol. 12 No.2 Tahun 2017 : Peran Media Komunikasi Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Dalam Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Terhadap HIV/AIDS di Kabupaten Biak Numfor

Vol. 6 No.2 Tahun 2019 : Koordinasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Upaya Penanggulangan HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru

Vol. 3 No.1 Tahun 2018 : Analisa Pelaksanaan Program Penanggulangan HIV dan AIDS Di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi

Vol. 4 No.2 Tahun 2010 : Peranan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru Dalam Mencegah dan Menanggulangi HIV dan AIDS Di Kota Pekanbaru

Vol. 4 No.2 Tahun 2016 : Peran Komisi Penanggulangan Daerah (KPAD) Dalam Penanggulangan HIV/AIDS di Kabupaten Kotawaringin Timur

Vol. 3 No.8 Tahun 2018 : Analisa Faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan HIV/AIDS di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman

Vol. 1 No.2 Tahun 2012 : Adaptasi Pengidap HIV Dan AIDS Serta Peran LSM Di Kota Pekanbaru.

Vol. 4 No.1 Tahun 2019 : Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS Melalui Peningkatan Pengetahuan dan Screening HIV/AIDS Pada Kelompok Beresiko di Belawan Sumatera Utara

Vol. 1 No.1 Tahun 2019 : Penanggulangan dan Pencegahann HIV dan AIDS Secara Terintegasi, Tepat, Kolaboratif dan Berkesinambungan di Kabupaten Semarang

SUMBER LAIN

Internet

Halloriau.com

Seriau.com